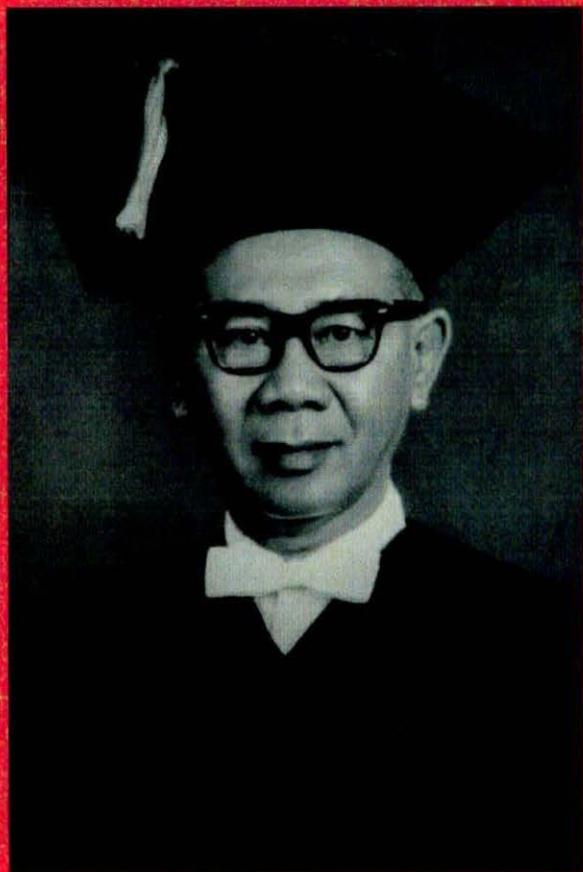


**SOSOK DAN PEMIKIRAN KEBANGSAAN  
PROF. MR. SOEDIMAN KARTOHADIPRODJO**



**Direktorat  
Budayaan**

98

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
MUSEUM SUMPAAH PEMUDA  
2007**

Sosok dan Pemikiran Kebangsaan

Prof. Mr. Soediman

Kartohadiprodjo

Sosok dan Pemikiran Kebangsaan  
Prof Mr. Soediman  
Kartohadiprodjo

Darmansyah  
Momon Abdul Rahman

Museum Sumpah Pemuda

# Sosok dan Pemikiran Kebangsaan Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo

Diterbitkan oleh  
Museum Sumpah Pemuda  
Jl. Kramat Raya No. 106, Jakarta 10420  
Telp. 3103217, 3154546; Fax. 3154546 ext 18

Penyunting: Agus Nugroho  
Tata letak: Misman  
Desain muka: Dadank

Cetakan Pertama 2007

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## Darmansyah

**Soediman Kartohadiprodjo/ Darmansyah dan Momon Abdul Rahman;** penyunting Agus Nugroho. -- Jakarta: Museum Sumpah Pemuda, 2007. xx+145 hlm.; 14 x 21,5 cm.

ISBN 979-98998-2-7

1. Kartohadiprodjo, Soediman.

I. Momon Abdul Rahman.

959.8

## Pengantar Penulis

**SOEDIMAN KARTOHADIPRODJO** adalah salah seorang dari sembilan tokoh pemuda yang terpilih untuk memformulasikan persatuan pemuda ke dalam sebuah organisasi pemuda. Delapan tokoh lainnya adalah Mr. R.T. Soenardi Djaksodipoero (R.T. Wongsonagoro), Muhammad Yamin, Raden Koentjoro Poerbopranoto, R. M. Joesoepadi Danoediningrat, Adenan Kapau Gani, Asaat Dt. Mudo, Kroeng Raba Nasoetion, dan Mohammad Tamzil.

Tokoh-tokoh tersebut terpilih dalam sebuah pertemuan pada 29 April 1929 di Gedung Indonesische Clubgebouw, jalan Kramat 106, Jakarta (sekarang Museum Sumpah Pemuda). Tugas yang dibebankan kepada mereka sungguh luar biasa berat, membawa pergerakan pemuda melewati masa transisi dari pergerakan pemuda kedaerahan menjadi pergerakan pemuda nasional. Berhasil tidaknya pergerakan nasional melewati masa transisi tergantung kepada kemampuan mereka mengakomodasi kepentingan semua pergerakan pemuda.

Berkat kerja keras mereka selama satu tahun, pada tanggal 31 Desember 1930 transisi itu terlewat. Pada tanggal 1 Januari 1931 dapatlah dibentuk sebuah wadah pergerakan pemuda bernama **Indonesia Muda**. Kongres pembentukannya diselenggarakan di Solo. Dengan terbentuknya Indonesia Muda tidak ada lagi organisasi pemuda kedaerahan atau menurut istilah zaman itu, *tidak ada jong ini jong itu*.

Setelah Indonesia merdeka, Raden Soediman Kartohadiprodjo, tidak hanya menjadi pemimpin dengan

menduduki berbagai jabatan penting di pemerintahan, tapi juga menjadi pintu bagi lahirnya pemimpin berikutnya. Tokoh-tokoh besar hasil didikannya antara lain Mochtar Kusumaatmadja, seorang yang turut andil dalam Deklarasi Djuanda 1957 yang mengokohkan kedaulatan Indonesia atas lautnya, Prof. Dr. Priyatna Abdurrajsid, Prof. Dr. T.M. Ihromi, M.A, dan P.K. Oyong.

Sejak sekolah menengah HBS (Hoogere Burger School), Soediman Kartohadiprodjo sudah aktif mengikuti kegiatan organisasi pemuda Jong Java dan setelah menjadi mahasiswa RHS (Rechtskundige Hoogeschool / Sekolah Tinggi Hukum) ikut bergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi mahasiswa yang memperjuangkan persatuan Indonesia dan dicap Belanda sangat radikal. Sekretariat PPPI berada di gedung Kramat 106, tempat yang menjadi kost-an Soegondo Djojopuspito, ketua PPPI dan ketua Kongres Pemuda Kedua. Soediman aktif dalam proses sebelum dan sesudah Kongres Pemuda Kedua. Ketika kongres Pemuda Kedua digelar ia menjadi peserta kongres.

Mengingat besarnya jasa Soediman Kartohadiprodjo bagi terbinanya persatuan bangsa Indonesia sudah sepantasnya generasi muda sekarang meneladani perjuangannya. Riwayat hidup yang diwarnai perjuangan dan pemikiran Soediman Kartohadiprodjo pantas untuk kita baca, telaah, dan renungkan untuk diambil sebagai contoh dalam melangkah ke depan agar hidup dapat menjadi lebih baik.

Jakarta, Oktober 2007.

Darmansyah  
Momon Abdul Rahman

## **Kata Pengantar**

### **Kepala Museum Sumpah Pemuda**

**PERISTIWA** Sumpah Pemuda mungkin semua orang pernah mendengar. Hampir semua pejabat, termasuk presiden, pernah menyinggung sumpah pemuda dalam pidatonya. Hal ini disebabkan sumpah pemuda merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Namun, sangat disayangkan. Peristiwa sepenting itu belum mendapat kajian dan pembahasan yang mendalam. Bahkan sampai saat ini belum

ada terbitan tentang sejarah sumpah pemuda yang komprehensif.

Tulisan-tulisan yang ada masih bersifat tulisan lepas seperti artikel, atau dimuat sebagai bagian dari biografi seorang tokoh yang mengalaminya. Bahkan buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang merupakan babon dalam penulisan sejarah Indonesia juga kurang memberi tempat kepada sumpah pemuda. Sebagai suatu peristiwa yang menjadi suatu titik tolak persatuan bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda hanya ditulis dalam satu alinea dari total 2840 halaman SNI yang berjumlah 6 jilid.

Berangkat dari keinginan memberikan informasi kepada masyarakat tentang Sejarah Sumpah Pemuda, Museum Sumpah Pemuda sebagai museum khusus yang mempunyai tugas melestarikan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 29/O/1984, kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor KM.47/OT.001/MKP/2003, tanggal 5 Desember 2003 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.33/OT.001/MKP-2006 tanggal 7 September 2006; terus berusaha mengumpulkan data seputar Peristiwa Sumpah Pemuda dan memberikan informasi baru tentang hasil-hasil pengumpulan data tersebut. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian ilmiah ini penting untuk dapat meningkatkan apresiasi para pelajar dan masyarakat umum terhadap perjuangan para tokoh pendiri bangsa terutama para pemudanya. Hal ini juga sejalan dengan visi Museum Sumpah Pemuda yaitu “Terwujudnya pelestarian dan komunikasi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah Sumpah Pemuda untuk kepentingan pembinaan generasi muda.”

Salah satu wujud dari penyampaian informasi kepada masyarakat seputar Peristiwa Sumpah Pemuda dan Pergerakan Pemuda, setiap tahun Museum Sumpah Pemuda mengadakan kegiatan seminar, penelitian, pameran dan penerbitan beberapa buku biografi yang menyangkut tokoh-

tokoh Kongres Pemuda. Kegiatan ini terus akan dilaksanakan. Tokoh-tokoh yang pernah ditampilkan antara lain Wage Rudolf Supratman pencipta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang mengumandangkan lagu Indonesia Raya melalui biolanya pada saat penutupan Kongres Pemuda Kedua; Mohammad Yamin tokoh Jong Sumatranen Bond yang menjabat sekretaris Kongres Pemuda Kedua sekaligus konseptor “Sumpah Pemuda”; Johannes Leimena tokoh Jong Ambon yang menjabat panitia Kongres Pemuda Kedua.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai perwujudan dari salah satu misi Museum Sumpah Pemuda yaitu memperkenalkan dan menyebarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan sejarah Sumpah Pemuda.

Pada tahun 2007 Museum Sumpah Pemuda telah memprogramkan untuk mengadakan kegiatan seminar, penelitian, pameran dan penerbitan biografi salah satu tokoh Pergerakan Pemuda Raden Soediman Kartohadiprojo. Semasa hidupnya, R. Soediman adalah

anggota Jong Java, peserta Kongres Pemuda Kedua, Sekretaris II PB Jong Java saat masa transformasi dari organisasi kedaerahan menjadi organisasi pergerakan kebangsaan, menjadi anggota Komisi Besar Indonesia Muda dan pengurus Indonesia Muda Cabang Jakarta.

Jakarta, Oktober 2007

Kepala,



Drs. Agus Nugroho

**NIP 131 875 469**

**Sambutan**  
**Keluarga Prof. Mr. Soediman**  
**Kartohadiprodjo**

**PADA** hari ini saya atas nama keluarga besar Prof Mr. Soediman Kartohadiprodjo merasa sangat terharu dan mendapat kehormatan bahwa Museum Sumpah Pemuda pada tahun 2007 menerbitkan buku berjudul: SOSOK DAN PEMIKIRAN KEBANGSAAN PROF. MR. SOEDIMAN KARTOHADIPRODJO pada peringatan hari Sumpah

Pemuda tanggal 28 Oktober 2007 di Gedung Museum Sumpah Pemuda, Jalan Kramat Raya 106, Jakarta.

Memang benar almarhum selama hidupnya senang berorganisasi dan memasuki organisasi yang tidak sekedar organisasi biasa tetapi yang mempunyai tujuan membangun bangsa. Kami sebagai ahli waris dari Bapak Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo, merasa bangga bahwa ayah kami adalah salah satu tokoh pelopor peristiwa SUMPAH PEMUDA. Di samping berorganisasi beliau juga gemar membaca buku-buku ilmu pengetahuan dan melahirkan beberapa tulisan. Pengetahuan yang diperoleh dan diserap beliau dari buku-buku tersebut tampaknya tidak sia-sia, karena beliau telah banyak melahirkan murid-murid yang sekarang telah menduduki jabatan penting di masyarakat, misalnya Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Prof. Dr. Ismail Sunny, Prof. Dr. Harun Alrasjid, dan lain-lain.

Buku peringatan ini adalah sekedar sumbangan Museum Sumpah Pemuda dan Keluarga Besar Soediman Kartohadiprodjo kepada masyarakat atau kerabat yang

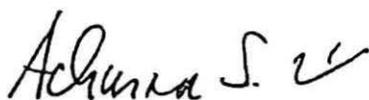
dekat dengan Pak Soediman, untuk memberikan ilustrasi kembali mengenai perjuangan Pak Soediman semasa hidupnya sampai Tuhan Yang Maha Esa memanggil beliau pada tanggal 26 Januari 1970 di Bandung.

Saya ucapkan terima kasih kepada Darmansyah, S.S., Momon A. Rachman, S.S. dan Drs. Agus Nugroho dan segenap staf Museum Sumpah Pemuda yang telah berkenan menerbitkan buku **SOSOK DAN PEMIKIRAN KEBANGSAAN PROF. MR. SOEDIMAN KARTOHADIPRODJO** ini.

Semoga amal suci dan suri teladan yang diberikan Pak Soediman dapat berguna bagi bangsa, negara dan bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan hukum di Indonesia.

Jakarta, 28 Oktober 2007

Atas nama Keluarga Besar  
Soediman Kartohadiprodjo



Achmad S. Kartohadiprodjo

## Daftar Isi

	hal
Pengantar Penulis.....v	
Kata Pengantar Kepala Museum Sumpah Pemuda.....ix	
Sambutan Keluarga Prof. Mr. R. Soediman	
Kartohadiprodjo.....xv	
Daftar Isi.....xix	
Bab 1 Masa Kecil ..... 1	
Bab 2 Dari Geneeskundige ke Rechtskundige.....17	

Bab 3 Aktif di Berbagai Organisasi Pemuda.....	33
Bab 4 Keluarga dan Karier.....	77
Bab 5 Pengabdian Pada Republik.....	89
Bab 6 Pemikiran Mr. Soediman Kartohadiprodjo.....	109
Daftar Sumber.....	119
Lampiran.....	125

# **Bab 1**

## **Masa Kecil**

### **Latar Keluarga**

**PADA** tahun 1906, Raden Tumenggung Bawadiman Kartohadiprodjo seorang tamatan Osvia Magelang (Opleiding School voor Ambtenaren/ sekolah yang mendidik calon Pamong Praja), mendapat penugasan ke Jatirogo, Kabupaten Tuban. Penugasan ini merupakan promosi bagi R.T. Bawadiman yang sebelumnya menjabat

asisten sekretaris pada Kabupaten Tuban (Soelasbawiati, tt : 2).

Di Jatirogo, karir Bawadiman kembali naik. Hanya dalam tempo dua tahun ia sudah menjadi mantri polisi. Di tempat ini, Bawadiman mendapatkan putera pertama yang diberi nama Raden Soediman Kartohadiprodjo. Soediman dilahirkan pada tanggal 3 September 1908. Ibu Soediman bernama Raden Ayu Oemi Kartohadiprodjo.

Setelah Soediman lahir maka pada tahun-tahun berikutnya lahir adik-adik Soediman. Beberapa saudara kandung Soediman lainnya ada yang meninggal ketika masih berusia muda. Sebagai anak tertua Soediman mempunyai kewajiban membimbing adik-adiknya yang berjumlah enam orang yaitu Raden Ajeng Soekanti, Raden Soekarmen Kusumohadiprodjo, Raden Ajeng Soelasbawiati, Raden Sayidiman Soeryohadiprodjo dan Raden Ajeng Soelasmiarti.

Berdasarkan silsilah keluarga, R.T. Bawadiman Kartohadiprodjo dan R.Ay. Oemi Kartohadiprodjo berasal dari keturunan bangsawan Madura. Keduanya masih

mempunyai hubungan saudara. Kakeknya Soediman dari pihak ayah adalah kakak kandung kakeknya Soediman dari pihak ibu. Dalam tradisi Jawa pertalian saudara itu disebut sepupu *pancer wali*. Keluarga Bawadiman berasal dari Panden, Tuban, Jawa Timur.

Salah seorang kakak R.Ay. Oemi Kartohadiprojdo adalah Soetardjo Kartohadikoesoemo—anggota Volksraad—yang dalam sejarah pergerakan terkenal karena mengeluarkan petisi kepada Pemerintah Hindia Belanda yang menuntut dibentuknya sebuah badan perwakilan bagi bangsa Indonesia.



Raden Tumenggung Bawadiman Kartohadiprojdo dan Raden Ayu Oemi Kartohadiprojdo, orangtua Prof. Mr. Soediman Kartohadiprojdo

## Pembentukan Karakter

MASA kecil adalah masa pembentukan karakter. Pada masa ini keluarga memegang peranan penting. Sosok Soediman dengan prinsip kesederhanaan, kejujuran dan kedisiplinan adalah buah dari pendidikan dalam keluarga.

Soediman mendapat didikan orang tua berdasarkan filsafat dan budaya Jawa. Filsafat yang diajarkan kepada Soediman dan diterapkan dalam keluarga, antara lain:

1. *Sopo sing tresno Gusti Alloh kudu tresno sapodo-podo* (Siapa yang mencintai Allah harus mencintai sesama);
2. *Sing prihatin* (Dalam keadaan apapun ingat kepada Tuhan Sang Pencipta);
3. *Ambeg Paramarta* (Suka menolong serta memaafkan dan sabar);
4. *Andap Asar* (rendah hati);
5. *Tepo Saliro* (empati kepada orang lain) (Soelasbawati, tt : 3).

Filosofi “siapa yang mencintai Allah harus mencintai sesama” dan “suka menolong serta memaafkan dan sabar”

ditanamkan melalui sikap kebersamaan dalam kehidupan keluarga besar. Selain keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, dalam keluarga R.T. Bawadiman juga ada beberapa keponakan dan beberapa pembantu yang ikut tinggal bersama. Dalam kehidupan sehari-hari kedua orangtua Soediman tidak pernah membedakan kasih sayang antara anak kandung dengan keponakan, dan anak-anak dididik untuk selalu menghormati para pembantu.

Lahir di tengah keluarga yang mendapat pendidikan Belanda dan banyak menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Hindia Belanda, tidak membuat Soediman menjadi tinggi hati. Karena Filosofi “rendah hati” yang ditanamkan di tengah keluarga yang diwujudkan dalam bentuk tata krama menghormati semua orang, termasuk pada orang yang statusnya lebih rendah. Sejak kecil Soediman dilarang memakai bahasa Jawa Ngoko (bahasa Jawa rendahan) kepada para pembantu atau pengemis sekalipun. Ia tidak pula diperkenankan duduk di kursi sementara ada pembantu duduk di lantai. Sikap rendah hati yang ditanamkan berbuah ketika dewasa dengan keengganannya Soediman memakai gelar raden.

Filosofi “suka menolong serta memaafkan dan sabar” ditanamkan melalui perilaku R.T. Bawadiman dan R.Ay. Oemi Kartohadiprojo yang menjadi contoh oleh Soediman dan adik-adiknya. Hal itu membuahkan ketabahan dalam menghadapi setiap persoalan dan kemandirian. Sifat tabah ditunjukkan Soediman ketika memimpin Perguruan Tinggi Darurat Indonesia di Jakarta antara tahun 1946-1949 di tengah keterbatasan sarana dan tekanan dari pemerintahan NICA Belanda.

Sementara itu, nilai-nilai kemandirian ditanamkan melalui cara memisahkan Soediman dengan kedua orang tua, di saat Soediman masih kecil. Soediman melewati masa kecilnya di Blora, Jawa Tengah. Ia tinggal dengan nenek—dalam masyarakat Jawa disebut *eyang puteri*—dari pihak ibu. Eyang puterinya adalah isteri pensiunan Wedana Tuban, Jawa Timur. Tradisi ini dalam masyarakat Jawa disebut *menyapih* yaitu memisahkan anak dari orang tuanya. Soediman tinggal di Blora, Jawa Tengah sedangkan ayah ibunya tinggal di Jatirogo, Tuban, Jawa Timur.

Filosofi “empati kepada orang lain” ditunjukkan Soediman saat menjadi mahaguru di Universitas Indonesia Jakarta dan kemudian di Universitas Padjadjaran dan Universitas Katholik Parahyangan Bandung, Soediman selalu menyebut mahasiswa dengan sebutan “saudara” dan tidak pernah memanggil mahasiswa dengan “namanya” saja atau “kamu”.

Filsafat dan budaya Jawa yang diterima Soediman sebagian besar didapat dari sang ibu, R.Ay. Oemi Kartohadiprodjo. Hal itu menunjukkan Keluarga R.T. Bawadiman dalam mendidik anak-anaknya, sudah menerapkan apa yang diperjuangkan Kartini. Kartini berjuang agar seorang ibu dapat melahirkan generasi yang kuat dan kokoh. (Sayidiman Suryohadiprodjo, 23 Mei 2007)

## **Menjadi Siswa Sekolah Rendah Eropa (ELS)**

**GELAR** “raden” di depan nama-nama anggota keluarga R.T. Bawadiman menunjukkan bahwa Soediman berasal

dari kalangan bangsawan masyarakat Jawa. Gelar raden pada masa Pemerintah Hindia Belanda berarti menjadi “pembuka berbagai kesempatan”. Dikatakan menjadi pembuka kesempatan mengingat hanya kelas menengah—yang di Jawa ditandai dengan sebutan raden atau pangeran—yang dapat memasuki sekolah yang setara dengan anak-anak Belanda.

Pada tahun 1915 ketika usianya mencapai 7 tahun, Soediman mulai memasuki pendidikan dasar (*lagere onderwijs*). Pendidikan dasar pada masa Hindia Belanda terbagi atas beberapa macam/model/jenis yaitu:

1. Sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda (*wstersch lager onderwijs*) yaitu ELS (Eropeesche Lager School / Sekolah Rendah Eropa) dan Sekolah Bumi putera kelas satu (*eerste klasse school*) seperti HIS (Hollandsch Inlandsch School) dan HCS (Hollandsch Chinese School).
2. Sekolah dengan bahasa pengantar bahasa daerah yaitu sekolah bumiputera kelas dua, sekolah desa, dan *vervolgschool*

3. Sekolah peralihan (schakelschool) adalah sekolah peralihan dari sekolah desa tiga tahun ke sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. (Mestoko, 1985 : 112-113).

ELS (Europeesche Lagere School) adalah sekolah rendah dengan persyaratan terberat/tertinggi. Untuk sekolah di ELS diperlukan biaya besar Biaya rata-rata untuk seorang siswa ELS adalah *f* 90,-.(sembilan puluh gulden) Jumlah tersebut adalah dua kali lipat biaya untuk HIS yang hanya *f* 45,-.

ELS yang lama pendidikannya 7 tahun pertama kali didirikan pada tahun 1818. ELS hanya terdapat di kota kabupaten. Jumlahnya di seluruh Hindia Belanda hanya 325 sekolah. Jumlah muridnya hanya 32.000 orang. Jumlah yang sangat kecil dibanding 50 juta penduduk Hindia Belanda (Mestoko, 1985 : 123). Untuk masuk ELS diberlakukan syarat-syarat :

1. Orang tua harus berpangkat komis kelas I atau yang dianggap sama;
2. Calon harus sudah menguasai bahasa Belanda;

Untuk menguji kemampuan bahasa Belanda si calon akan diajak bercakap-cakap dalam bahasa Belanda oleh Kepala Sekolah. Kepala Sekolah akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan singkat kepada si calon. Walaupun berasal dari kelas atas dan secara sosial dapat diterima di sekolah Belanda, apabila kemampuan bahasa Belandanya jelek, si calon akan ditolak.

Hampir semua keluarga yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah Belanda, membekali pendidikan berbahasa Belanda dulu buat putra-putrinya. Cara yang lazim digunakan yakni memanggil guru orang Belanda untuk mempersiapkan kemampuan sang anak berbahasa Belanda, menyuruh anaknya ikut kursus bahasa Belanda, membiasakan anaknya bergaul dengan anak Belanda atau membiasakan berbahasa Belanda dalam lingkungan keluarga. Maka tak jarang, ada orang tua secara khusus “menitipkan” anaknya tinggal di rumah keluarga pribumi yang berbahasa Belanda, atau tinggal orang Belanda totok.

Satu contoh keluarga bangsawan yang pernah indekost di keluarga Belanda, antara lain anak-anak

keluarga Djajadiningrat dari Banten. Misalnya Achmad Djadiningrat, sebelum anak sulung ini masuk sekolah, ia dititipkan di Batavia pada keluarga Kampschuur. Selain belajar bahasa Belanda juga supanya ia bergaul tiap hari dengan 11 anak keluarga Belanda ini, agar lidahnya tampak luwes berbahasa Belanda. Selain itu juga, Achmad dibiasakan berganti tata busana ala Banten menjadi pakaian gaya anak Belanda. Setelah sekolah, Achmad Djajadiningrat harus berganti indekos pada keluarga Meister dan keluarga Postma.

Selain keluarga Djajadiningrat di Banten, juga keluarga Wiranatakusumah dari Priangan, menganut prinsip indekost demi peningkatan pendidikan anak-anaknya. Begitupun di Jawa Tengah banyak golongan bangsawan pribumi yang memandang perlu pendidikan Barat bagi keluarganya, misalnya Sosrokartono—kakak lelaki R. A. Kartini—pernah indekost pada salah satu keluarga Belanda di Semarang, sambil bersekolah di HBS (Hoogere Burger School). Belakanganpun, Sosrokartono bersekolah lebih lanjut ke Belanda, dia mengakui rahasia kefasihannya

berbahasa Belanda, berkat metode “titip anak” dan indokost di rumah orang Belanda.

Ketika bersekolah di ELS Blora, Soediman tinggal di rumah keluarga Prawirodirdjo, kakak R. Ayu Oemi Kartohadiprodjo (Soelasbawiati, tt: 5-6). Soediman dapat memasuki sekolah itu karena kedudukan ayahnya saat itu sebagai Jaksa di Blora. Sebelum menjadi Jaksa, ayah Soediman, R.T. Bawadiman menjabat Asisten Wedana Todanan, Distrik Ngawen, Blora. Setelah menjabat sebagai Jaksa selama setahun, R.T. Bawadiman mendapat penugasan untuk belajar di Bestuurschool (Sekolah Lanjutan Pamong Praja) di Batavia. Selesai menjalankan tugas belajar, R.T. Bawadiman ditempatkan sebagai wedana Jatirogo.

Di saat menjabat Wedana Jatirogo R.T. Bawadiman sering kali mendapat kunjungan Inspektur Pendidikan, Boediardjo yang tinggal di Malang. Boediardjo menyarankan agar Soediman menyelesaikan ELS nya di Malang. Saran itu disetujui oleh R.T. Bawadiman Kartohadiprodjo. Selama menempuh pendidikan ELS di

Malang, Soediman tinggal di rumah keluarga Boediardjo dan akrab dengan Ali Boediardjo anak dari Boediardjo. Pergaulan dalam keluarga Boediardjo ditekankan menggunakan bahasa Belanda. Hal itu menumbuhkan kebiasaan berbahasa Belanda yang sangat dibutuhkan Soediman dalam menempuh pendidikan di ELS. Seorang kerabat yang bernama Karmen diikutsertakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Soediman. Pada tahun 1922, Soediman menyelesaikan pendidikan ELS di Malang (Soelasbawati, tt : 10).

## **Siswa HBS Semarang**

**SETELAH** lulus ELS, Soediman meneruskan pendidikannya ke HBS (Hoogere Burger School/ Sekolah Lanjutan Masyarakat) di Semarang. HBS Semarang didirikan pada tahun 1887. Lama pendidikan di HBS adalah 5 tahun.

HBS pertama kali didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1860, sekolahnya bernama Koenig Willem III

(Kawedri). Sampai tahun 1900 hanya anak-anak Eropa yang mendapat kesempatan sekolah di HBS. Karena kebijakan politik etis tahun 1904, anak pribumi boleh masuk ke HBS. (Mestoko, 1985 : 131)

Selama menempuh pendidikan di HBS Semarang, Soediman tinggal pada keluarga dr. Moenandar Yang merupakan famili Soediman dari pihak ibu. Rumah dr. Moenandar terletak di Jalan Pandean Lemper, Semarang. Soediman dititipkan pada keluarga dr. Moenandar bersama dengan dengan adiknya yang bernama Soelasikin . Saat itu Soelasikin menjadi pelajar Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Adik Soediman itu meninggal pada usia 16 tahun.

Saat itu memang ada kebiasaan untuk menitipkan anak yang sekolah di kota-kota besar pada keluarga yang dikenal dengan baik atau keluarga terpelajar agar terpengaruh pola hidup kalangan terpelajar itu. Soekarno (Presiden Pertama RI) waktu bersekolah di HBS Surabaya mondok di rumah keluarga Tjokroaminoto. Sutan Syahrir, indekost di rumah keluarga Minang di Bandung. Ali

Sastoamidjojo mondok di Batavia dalam rumah keluarga Kartosasmito, begitu pula Dr. Soetomo tinggal di rumah R. Djojoatmodjo yang menjabat wedana di Madiun.

Soekarno saat indekost di rumah keluarga Tjokroaminoto, mulai tertarik dan banyak mengenal serta bergaul dengan tokoh-tokoh Indonesia yang prihatin soal situasi politik di Hindia-Belanda. Juga di rumah Kartosasmito, Ali Sastroamidjojo berkenalan dengan tokoh politik Jawa. Soetomopun selama mondok di keluarga Djojatmodjo, banyak bergaul dengan beberapa tokoh pergerakan. Berada dalam lingkungan keluarga dr. Moenandar menumbuhkan minat dalam diri Soediman pada bidang kedokteran dan bercita-cita menjadi dokter setelah lulus HBS.

Saat Soediman menempuh pendidikan di HBS, R.T. Bawadiman diangkat menjadi Wedana di Cepu. Di Cepu terdapat perusahaan minyak Bataafsche Petroleum Maatschapij (BPM). Beberapa tahun kemudian R.T. Bawadiman mendapat kenaikan pangkat jabatan menjadi patih di Bojonegoro. Jabatan patih adalah jabatan tertinggi

kedua yang dapat diraih bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda, setelah bupati.

## **Bab 2**

# **Dari Geneeskundige ke Rechtskundige**

### **Munculnya Perguruan Tinggi di Hindia Belanda**

**PENDIDIKAN** formal pada masa penjajahan Belanda selain langka, juga memegang peranan penting dalam mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Bersekolah di perguruan formal memiliki persyaratan akademis dan keuangan yang tidak kecil. Banyak orang tua pribumi yang masuk dalam golongan “mampu”, bersedia mengorbankan segalanya demi pendidikan anak-anak mereka. Sebagian dari mereka harus rela mengirimkan anak mereka tinggal di tempat lain. Sekolah-sekolah lanjutan hanya terbatas di beberapa kota besar di Jawa saja. Jadi mau tak mau, bagi siswa dari kota kecil di Jawa dan luar Jawa harus pergi ke kota-kota besar di Jawa yang saat itu hanya bisa ditempuh melalui jalan darat atau dengan kapal laut yang memakan waktu.

Untuk menempuh pendidikan tinggi para pemuda Indonesia bahkan harus pergi ke Belanda atau negara Eropa lainnya. Di Hindia Belanda pada saat itu belum ada satupun perguruan tinggi. Belajar di Belanda dan Eropa memerlukan biaya yang sangat besar. Biaya sekolah di perguruan tinggi di Belanda selama setahun pada awal abad ke-20 sedikitnya adalah *f* 770 ,- (tujuh ratus tujuh puluh gulden) dengan rincian *f* 480,- (empat ratus delapan puluh gulden) untuk sewa kamar berikut makan dan cuci, *f* 220 ,- (dua ratus dua

puluh gulden) untuk buku dan ongkos belajar empat jam pelajaran perminggu, dan *f* 70,- (tujuh puluh gulden) untuk pakaian. Apabila kuliah dapat diselesaikan dalam 5 tahun, maka biaya yang diperlukan sekitar *f* 3.850,- (tiga ribu delapan ratus lima puluh gulden). Belum lagi kalau ditambah biaya rekreasi, kesehatan dan ongkos kapal laut pulang-pergi. Angkanya bisa membengkak menjadi *f* 5.000,- (lima ribu gulden) sampai dengan *f* 6.000,- (enam ribu gulden). Jumlah tersebut terhitung sangat besar. Apalagi bila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia yang hanya *f* 161,- (seratus enam puluh satu gulden) per tahun. Tidak mengherankan jika pada masa itu hanya anak bupati atau sultan saja yang dapat berangkat ke Belanda untuk menempuh pendidikan tinggi.

Memang ada pendidikan tinggi yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah yaitu KMA (Koningklijk Militair Academie / Akademi Militer Kerajaan) di Breda. Perguruan tinggi ini menghasilkan para perwira militer untuk ditempatkan di Belanda maupun di Hindia Belanda. Tiap tahun, satu orang Indonesia diterima

di perguruan tinggi ini. Beberapa orang lulusannya kemudian memegang peranan penting dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia.

Ketika Perang Dunia Pertama berkecamuk di Eropa pada tahun 1914 sampai dengan 1918, hubungan antara Hindia Belanda dan Belanda putus. Jalur pelayaran dari Hindia Belanda ke Belanda dan sebaliknya terganggu. Belanda diserang Jerman. Kota-kotanya dijatuhi bom. Suasana perang di Eropa sangat berpengaruh kepada situasi sosial politik di Hindia Belanda. Hal yang sangat dirasakan adalah kurangnya sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi untuk mengisi posisi-posisi dalam pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan swasta. Saat itu muncul gagasan dari sekelompok pengusaha untuk mendirikan perguruan tinggi di Hindia Belanda.

Pada tahun 1920 sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Koninklijk Instituut voor Hooge Technisch Onderwijs in Nederlandsch Indië melakukan terobosan dengan mendirikan lembaga pendidikan teknik tinggi dengan nama THS (Technische Hoogeschool /

Sekolah Tinggi Teknik). Pada tahun 1924 pengelolaan sekolah tinggi yang semula berada di tangan swasta diambil alih Pemerintah Hindia Belanda (Mestoko, 1985: 33).

Bersama dengan pengambilalihan Technische Hoogeschool, Pemerintah Hindia-Belanda membuka RHS (Rechtskundige Hoogeschool / Sekolah Tinggi Hukum) yang menerima lulusan AMS dan HBS. Sekolah hakim tinggi ini merupakan peningkatan dari RS (Rechts School/ Sekolah Hakim) yang menerima lulusan ELS dengan lama belajar 3 tahun (Mestoko, 1985 : 32).

Sementara itu, walaupun STOVIA atau biasa disebut Sekolah Dokter Jawa sudah berdiri sejak 1851, tetapi lembaga pendidikan tersebut tidak dapat disebut pendidikan tinggi karena menerima murid lulusan ELS (sekolah rendah) kemudian MULO, dan bukan HBS atau AMS. Lembaga pendidikan tinggi kedokteran yang sebenarnya baru berdiri pada tahun 1927 yaitu dengan didirikannya GHS (Geneskundige Hoogeschool/ Sekolah Tinggi Kedokteran ). Sekolah dengan lama belajar tujuh

tahun ini menerima lulusan AMS dan HBS (Mestoko, 1985 : 33).

Sampai perang dunia kedua, perguruan tinggi di Hindia Belanda hanya terdapat di Batavia, Bandung, dan Surabaya. Di Batavia terdapat dua perguruan tinggi, Geneeskundige Hoogeschool dan Rehtcskundige Hoogeschool. Di Bandung terdapat Technische Hoogeschool, dan di Surabaya terdapat NIAS (Nederlandsch Indie Artsen School / Sekolah Kedokteran Hindia Belanda).

Geneskundige Hoogeschool terletak di jalan Salemba Nomor 4, Batavia (sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia). Sekolah tinggi tersebut didirikan di sebelah lokasi pabrik candu (sekarang Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) Pengajarnya sebagian besar adalah bangsa Belanda. Bangsa Indonesia hanya sedikit yang diterima mengabdikan diri sebagai pengajar, di antara yang terkenal adalah Prof. Dr. Asikin.

Setiap tahun, Sekolah Tinggi Kedokteran menerima 40 orang lulusan AMS (Algemeene Middelbare School) Bagian B dan HBS (Hoogere Burger School) sebagai calon

22

mahasiswanya. Mereka akan dididik selama 7 tahun untuk mencapai gelar Arts.

Pelajar yang ingin belajar di Sekolah Tinggi Kedokteran harus pergi ke Batavia untuk menempuh studinya. Selain syarat-syarat yang berat untuk masuk sekolah, biaya hidup di Batavia cukup tinggi. Sewa rumah pada tahun 1920-an adalah antara *f* 12,50 (dua belas setengah gulden) sampai dengan *f* 20,- (dua puluh gulden) tiap bulan. Pendapatan kebanyakan penduduk Indonesia saat itu adalah *f* 13,50 (tiga belas setengah gulden) setiap bulan. Jelas hanya orang mampu yang dapat membiayai hidup anaknya yang sekolah di kota.

Ada pula beberapa pelajar yang mendapat beasiswa. Salah satu diantara lembaga yang memberikan beasiswa adalah Tjandi Stichting (Yayasan Tjandi). Tjandi Stichting dipimpin oleh Prof. Dr. F. M. Baron van Asbeck, Guru besar Sekolah Tinggi Hukum. Van Asbeck tinggal di Pegangsaan Oost No. 56 (Jalan Pegangsaan Timur No. 56). Para penerima beasiswa Tjandi Stichting di antaranya adalah Dr. R. Soeharto, dokter pribadi Bung Karno.

## **Mahasiswa Soediman**

**SOEDIMAN** yang bercita-cita menjadi dokter kemudian menuju Batavia untuk mendaftarkan diri pada Sekolah Tinggi Kedokteran. Soediman mendaftar ke GHS pada tahun 1927 dan menjadi mahasiswa angkatan pertama sekolah tinggi tersebut. Jumlah mahasiswa angkatan pertama berjumlah 16 orang, 12 orang Belanda dan hanya 4 orang pribumi Keempat mahasiswa pribumi adalah Soediman Kartohadiprodjo, Oetama, Soedjono Djoened Poesponegoro, dan Abdul Halim. (Hanafiah, 1976 : 22).

Pada tahun 1931, Soediman sudah menempuh empat tahun pendidikan di Sekolah Tinggi Kedokteran. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Soediman akan selesai menempuh pendidikan dan mendapat gelar Arts. Namun karena tidak cocok dengan panggilan jiwanya, Soediman akhirnya pindah ke Rechts Hooge School (RHS). Selain Soediman tokoh nasional yang pernah kuliah di GHS kemudian pindah ke RHS antara lain Asaat (pejabat Presiden RI tahun 1950). (Hanafiah, 1976: 24-25)

Untuk menempuh pendidikan tinggi di Batavia, Soediman harus meninggalkan ayah bundanya di Bojonegoro. Perjalanan ke Batavia saat itu hanya bisa ditempuh melalui jalan darat atau dengan kapal laut yang memakan waktu. Sebagai contoh kereta api cepat Batavia-Surabaya (Eendagte) menempuh perjalanan satu hari antara Batavia-Surabaya. Berangkat dari Batavia pagi hari sampai di Surabaya sore atau malam hari.

Selama menempuh pendidikan di GHS kemudian di RHS, Soediman tinggal di asrama Jan Pieterszoon Coen di jalan Guntur, Manggarai. Pondokan pelajar pada zaman Hindia-Belanda tidak hanya berfungsi sebagai sarana hunian melainkan juga sebagai sarana sosialisasi untuk mengembangkan kemampuan, baik yang berhubungan yang akademis maupun kehidupan sosial.

Pelajar dari luar Jawa yang sekolah di Batavia apabila pulang kampung biasanya memanfaatkan jasa angkutan laut yang diselenggarakan oleh KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschapij, Perusahaan Pelayaran Kerajaan). Mereka mendapat fasilitas seperti pegawai pemerintah.

Selain angkutan darat dan laut sebenarnya ada juga angkutan udara. Pemberangkatannya dari Lapangan Udara Cililitan yang terletak di luar kota. Setiap hari ada penerbangan ke Bandung, Semarang, dan Surabaya. Seminggu sekali ada penerbangan ke Palembang, Pekanbaru, Medan, dan Singapura. Penyelenggaranya adalah KNILM (Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschapij, Perusahaan Penerbangan Kerajaan di Hindia – Belanda). Angkutan udara saat itu tentu sangat mahal dan jarang digunakan oleh para pelajar.

Apabila musim liburan tiba, Soediman terlebih dahulu berkirim kabar tentang kepulangannya. Saat liburan merupakan saat yang menyenangkan bagi Soediman, ia dapat berkumpul dengan orang tua dan adik-adiknya. Soediman sering bercerita tentang Batavia, kota tempatnya menempuh pendidikan kepada adik-adiknya. Liburan juga dijadikan kesempatan oleh Soediman untuk bertemu teman-teman lamanya.

## **Meninggalnya Sang Ayahanda**

DI tahun 1931, pada awal Soediman menempuh pendidikan di RHS, R.T. Bawadiman menjabat sebagai patih di Bojonegoro. Selang dua tahun kemudian R.T. Bawadiman mendapat promosi jabatan tertinggi yaitu sebagai Bupati Pasuruan.

Tidak lama setelah menjabat sebagai bupati, R.T. Bawadiman berkeinginan menikahkan putera pertamanya, Soediman Kartohadiprodjo. Rencananya R.T. Bawadiman akan melamar Raden Ajeng Oetari Koesoemo Oetojo untuk putera pertamanya Soediman Kartohadiprodjo. Namun ternyata takdir bercerita lain, R.T. Bawadiman wafat pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 1933.

Soediman yang mendapat kabar ayahandanya meninggal baru bisa tiba di Pasuruan pada hari Kamis malam. Keterlambatan kedatangan Soediman disebabkan kesulitan angkutan pada masa itu. Kabar meninggalnya ayahanda Soediman diterima siang hari sedangkan kereta api cepat Jakarta – Surabaya satu-satunya alternatif

angkutan yang saat itu sudah berangkat pagi hari. Soediman tentu tidak dapat naik kereta pada hari Rabu karena sudah berangkat. Sudiman baru bisa berangkat pada Kamis, tanggal 19 Oktober 1933.

Meninggalnya sang ayahanda menimbulkan kesedihan yang sangat mendalam pada diri Soediman. Kejadian itupun mengakibatkan perubahan yang sangat penting dalam kehidupan Soediman:

1. Soediman sebagai anak tertua menggantikan peran ayahandanya sebagai kepala keluarga. Dalam kapasitas sebagai kepala keluarga ini Soediman harus memikirkan ibu dan adik-adiknya. Peran ini dijalannya dengan memberikan teladan kepada adik-adiknya. (Sayidiman Suryohadiprojo, 23 Mei 2007)
2. Sebagai bupati R.T. Bawadiman mendapat gaji sebesar *f* 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh gulden) (Soelasbawiti, tt : 55). Dari gaji ayahnya inilah biaya kuliah dan keperluan sehari-hari Soediman dipenuhi. Setelah ayahnya meninggal, pendapatan Ibu Soediman, R.Ay. Oemi Kartohadiprojo sebagai janda pensiunan

bupati hanya sebesar *f* 200,- (dua ratus gulden) Uang sebesar itu hanya untuk membiayai keperluan sekolah adik-adiknya Soediman, keperluan sehari-hari rumah tangga, dan lain-lain. Karena itu, Soediman harus memikirkan upaya mendapatkan dana untuk menyelesaikan kuliahnya di Sekolah Tinggi Hukum. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah mencari beasiswa. (Soelasbawiti, tt : 47)

Sepeninggal R.T. Bawadiman, Raden Ay. Oemi Kartohadiprodjo sekeluarga pindah ke Blora, kota yang menjadi tempat tinggal sebagian besar saudaranya. Sementara itu Soediman kembali ke Batavia untuk melanjutkan kuliahnya. (Soelasbawiti, tt : 47)

## **Meraih Gelar Sarjana**

**SETELAH** pindah ke Rechts Hooge School (RHS), Soediman merasa cocok menuntut ilmu di perguruan tinggi tersebut. Karena sesuai dengan panggilan jiwanya, selain

itu kedua orang tuanya tidak berkeberatan akan kepindahan Soediman dari GHS ke RHS.

RHS sebagai perguruan tinggi yang mendidik calon-calon ahli hukum ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 1924. Kampusnya terletak di jalan Gambir Barat Nomor 10, Batavia. Gedung kampus tersebut setelah Indonesia merdeka pernah digunakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebelum akhirnya digunakan sekarang oleh Departemen Pertahanan.

Gedung RHS bersebelahan dengan gedung Bataviasche Genootschap van Wetenschappen en Kunsten (Perhimpunan Ilmu Pengetahuan dan Seni Batavia) sekarang menjadi Museum Nasional. Pada saat itu lembaga ini mempunyai perpustakaan yang sangat lengkap. Ke sanalah para mahasiswa Indonesia menuju untuk membaca berbagai bahan bacaan. (Rufaedah, 2006).

Rechts Hooge School banyak mempunyai guru besar yang kompeten dan diakui kemampuannya di bidang hukum seperti Prof. Dr. J. H. A. Logeman, Prof. Mr. G. Ter Haar, guru besar pertama dalam hukum adat. Selain itu ada

juga guru besar bangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. P. A. A. Hoesein Djajadiningrat.

Di antara guru-guru besar tersebut, yang paling dekat hubungannya dengan Soediman adalah Prof. Dr. J. H. A. Logeman. Logeman banyak memberikan bimbingan dalam perkuliahan dan juga memberikan saran kepada Soediman dalam menentukan karir setamat dari GHS, Hubungan persahabatan antara murid dengan guru itu berlangsung hingga akhir hayat Logeman. Meninggalnya Logeman menimbulkan kesedihan yang sangat mendalam pada diri Soediman.

Lama pendidikan di Rechts Hooge School lima tahun. Untuk naik ke tingkat II diadakan ujian C I (eerste candidaat, kandidat pertama) jurist. Begitu seterusnya sampai C IV atau doctoral. Lulusannya berhak memakai gelar Meester in de Rechten (Mr.). Soediman menyelesaikan pendidikannya di RHS dengan gelar Meester in de Rechten (Mr, Sarjana Hukum) pada tahun 1936.

## **Bab 3**

# **Aktif di Berbagai Organisasi Pemuda**

### **Bergabung dengan Jong Java**

**KETIKA** menuntut ilmu di HBS Semarang, Soediman tergolong pelajar yang aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan. Sejak awal masuk HBS di tahun 1922, Soediman telah terdaftar sebagai anggota dalam dua

organisasi kepemudaan yaitu Among Pamitran (Perkumpulan murid-murid bumiputera di HBS Semarang) dan Jong Java (Pemuda Jawa). Di tahun 1924, Soediman terpilih sebagai ketua Among Pamitran. (Gatut Murniatmo, 1983: 69)

Pada saat Soediman memasuki HBS Semarang, di sekolah itu sudah lama berdiri cabang Jong Java. Organisasi Jong Java pada awalnya bernama Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia). Tiga tujuan mulia tersebut adalah:

1. Mengadakan hubungan antara para pelajar pribumi yang belajar di sekolah-sekolah tingi dan sekolah menengah, juga di kursus-kursus pendidikan lanjut dan vak (kejuruan);
2. Membangkitkan dan meningkatkan minat terhadap kesenian dan bahasa nasional;
3. Memajukan pengetahuan umum para anggotanya (*Jong Java Jaarboekje 1923* : 115 – 116).

Sejak tanggal 12 Juni 1918, Tri Koro Dharmo yang didirikan pada tanggal 7 Maret 1915 oleh Satiman

Wirjosandjojo berganti nama menjadi Jong Java. Cabang-cabang Jong Java kemudian didirikan hampir di semua kota yang mempunyai sekolah menengah baik itu MULO, AMS, ataupun HBS. Cabang Semarang merupakan salah satu cabang yang besar, dengan jumlah anggotanya mencapai ratusan orang.



Vandel Jong Java

Soediman masuk menjadi anggota Jong Java ketika berusia 14 tahun. Menurut Anggaran Dasar Jong Java usia Soediman pada saat itu merupakan syarat usia minimal untuk menjadi anggota. Syarat lainnya harus berpendidikan minimal MULO atau yang sederajat.

## Menuju Indonesia Raya

**PADA** tahun 1926, di usia yang ke 18 tahun Soediman terpilih menjadi pengurus cabang Jong Java Semarang (Murniatmo, 1983: 21). Dalam kapasitas sebagai pengurus cabang, Soediman hadir dalam kongres Jong Java yang sangat penting yaitu Kongres Jong Java, di Solo pada tanggal 27 – 31 Desember 1926. Kongres ini sangat penting mengingat terjadi perubahan orientasi Jong Java dari kedaerahan menjadi berorientasi keindonesiaan.

Dalam kongres tersebut dijelaskan oleh ketua Jong Java, R.T. Soenardi Djaksodipoero bahwa tujuan Jong Java tidak hanya membangunkan Jawa Raya saja, tetapi juga untuk kelak kemudian datang pada Indonesia Merdeka. Memajukan kesenian dan sebagainya dalam kegiatan Jong Java hanya alat-alat untuk mencapai yang lebih lanjut. (Jong Java, Januari-Februari 1927: 5)

Hal yang penting lainnya dalam kongres itu adalah menentukan apakah Jong Java akan terjun ke politik praktis atau tidak. Perdebatan itu muncul berawal dari usulan Mr.

Singgih yang menganggap pentingnya pelajar-pelajar Jong Java berkiprah dalam politik untuk memperjuangkan aspirasinya dalam negeri yang belum merdeka. Mr. Singgih membandingkan di negeri-negeri yang merdekapun para pelajarnya masih berlomba-lomba memperjuangkan aspirasinya dengan terjun dalam dunia politik. (Miert, 2003 : 496)

Keputusan akhir dari perdebatan itu adalah Jong Java sebagai organisasi akan memperjuangkan politik persatuan dalam lingkup Indonesia Raya dan memberi kesempatan kepada anggota untuk terjun dalam dunia politik tetapi secara organisasi tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan partai-partai politik

Selanjutnya dalam kongres tersebut diputuskan membagi anggotanya dalam dua kelompok yaitu anggota biasa dengan batasan usia 18 tahun atau lebih, dan calon anggota dengan batasan usia 14 tahun hingga 18 tahun. Calon anggota tidak diperbolehkan mengunjungi rapat-rapat anggota, tetapi boleh ikut dalam bagian olah raga, kesenian dan kependuan. Dengan jalan ini, Jong Java

melarang anggota yang belum dewasa untuk turut dalam lapangan politik.

Setelah kongres itu terlihat jelas, para pelajar yang tergabung dalam Jong Java menaruh cita-cita politik Indonesia Raya diatas cita-cita Jawa Raya berdasarkan kebudayaan. Akan tetapi permasalahan mempersatukan (fusi) atau menggabungkan diri (federasi) dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda lain masih menjadi perdebatan

Sementara itu, pada tahun 1927 Soediman menamatkan HBS di Semarang, kemudian ia pindah ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan ke GHS. Seiring dengan kepindahannya, aktifitas Soediman pun pindah dari Jong Java cabang Semarang ke Jong Java di Batavia.

Setelah statusnya resmi sebagai mahasiswa GHS, Soediman langsung mendaftarkan diri sebagai anggota Perhimpunan Peladjar-Peladjar Indonesia (PPPI). Ketika itu dalam tubuh PPPI berkembang ide untuk mempersatukan (fusi) seluruh perhimpunan pemuda ke dalam wadah tunggal. Rasa persatuan menyelimuti pemikiran seluruh

anggota PPPI, termasuk Soediman. Hal itu membuat Soediman bergabung dalam kelompok pendukung fusi di Jong Java.

Perdebatan masalah fusi atau konfederasi dalam tubuh Jong Java ternyata belum dapat diputuskan pada Kongres Kesepuluh, 26-31 Desember 1927 di Semarang. Hal itu disebabkan karena peserta kongres masih tetap mendukung pedoman yang ditetapkan Pengurus Besar Jong Java yang menyatakan bahwa Jong Java sebagai perhimpunan yang berkembang pesat dan pada saat itu sudah memiliki anggota sebanyak 2500 orang memiliki hak untuk berdiri sendiri. (Miert, 2003 : 498)

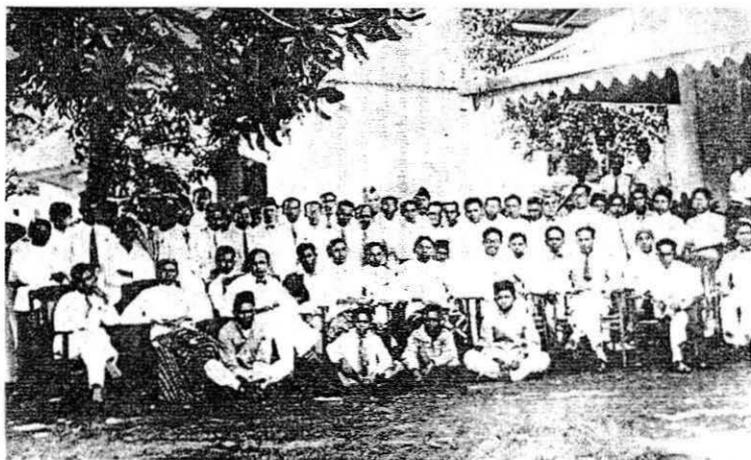
Pada awal tahun 1928 perdebatan antara fusi dan konfederasi masih berlanjut. Bahkan menjelang diselenggarakannya Kongres Pemuda Kedua tanggal 27-28 Oktober 1928, perdebatan tersebut dalam tubuh Jong Java makin memanas.

## Kongres Pemuda Kedua

**PADA** Kongres Pemuda kedua hadir perwakilan organisasi-organisasi pemuda seperti Perhimpoean Peladjar Peladjar Indonesia (PPPI), Jong Java, Jong Bataks Bond, Jong Islamieten Bond, Pemoeda Indonesia, Jong Celebes, Sekar Roekoen, Jong Ambon, Pemoeda Kaoem Betawi; dari partai politik hadir Partai Nasional Indonesia, Partai Sarekat Islam, Permoefakatan Perhimpoean-perhimpoean Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI); utusan organisasi masyarakat hadir Boedi Oetomo, Timoresch Verbond; utusan Pemerintah Hindia Belanda hadir Patih Batavia, Polisi, Adviseur voor Inlandsch Zaken (Penasehat Urusan Bumiputera) dan Politieke Inlichtingen Dienst (PID, Dinas Informasi Politik). (Abdul Rahman, 2005:57)

Kongres Pemuda Kedua merupakan kongres nasionalis paling legendaris di Indonesia. Kongres menghasilkan sebuah tekad untuk menjadi satu nusa, satu bangsa, dan bahasa. Sejak hari itu bangsa Indonesia lebih menyadari akan pentingnya persatuan. Tanggal itu

merupakan hari lahirnya sebuah bangsa, bangsa Indonesia (Miert, 2003 : 507 – 508).



Peserta Kongres Pemuda Kedua, 27-28 Oktober 1928

Hasil Kongres Pemuda Kedua kemudian dibawa ke setiap organisasi pemuda untuk mendapat pengesahan. Begitu juga mengenai masalah fusi yang menjadi pembicaraan dalam kongres. Penerimaan atau penolakan tergantung kongres masing-masing perkumpulan.

Setelah Kongres Pemuda Kedua, perdebatan antara fusi dan federasi dalam tubuh Jong Java semakin tajam. Jong Java terbagi ke dalam dua kubu. Kubu pertama tidak

setuju fusi. Alasannya, dengan mengikuti fusi akan menghilangkan identitas Kejawaan. Sementara kubu yang lain setuju fusi. Mereka yang setuju fusi beranggapan inilah saat untuk menunjukkan kebesaran Jong Java dalam berjuang. Demi perjuangan Jong Java bersedia mengorbankan diri dengan membubarkan diri dan melebur ke dalam organisasi baru. Dalam prinsip, Jong Java menetapkan untuk berfusi dan menyatakan sudah datang masanya untuk “membuktikan dengan tindakan yang nyata, bahwa perkumpulannya dapat mengorbankan dirinya.” (Abdul Rahman, 2003a:52)



Putusan Kongres Pemuda Kedua yang dimuat antara lain di koran *Persatoean Indonesia*, 15 Nopember 1928.

## Kongres XI Jong Java

**KEPUTUSAN** mengenai fusi atau tidaknya akan diambil dalam Kongres Mataram (Yogyakarta), pada 25 – 29 Desember 1928. Hasil dari kongres itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat pada waktu itu. Organisasi-organisasi lain menunggu dengan berdebar-debar keputusan Kongres Jong Java, karena Jong Java merupakan perkumpulan pemuda yang tertua dan yang terbesar dan memiliki organisasi yang rapi. Fusi perkumpulan-perkumpulan pemuda lainnya tanpa Jong Java akan kurang berarti.

Pada kongres itu muncul kekhawatiran akan adanya perpecahan dalam tubuh Jong Java , mengingat Satiman sebagai pendiri Jong Java dikabarkan tidak setuju Jong Java dibubarkan. Selain itu, pada saat sidang ketiga Kongres Pemuda Kedua, Djoko Marsaid, Wakil Ketua Kongres yang berasal dari Jong Java mengundurkan diri karena tidak setuju Jong Java digabung dengan organisasi pemuda lainnya. Pengunduran diri Djoko Marsaid ini dianggap

isyarat oleh sebagian organisasi pemuda bahwa di dalam Jong Java terdapat unsur yang tidak setuju dengan fusi.

Sementara bagi sebagian besar anggota Jong Java sendiri termasuk Soediman selama bertahun-tahun mengalami perkembangan pemikiran menganggap bahwa fusi adalah sesuatu yang logis. Walaupun anggota Jong Java adalah pendukung termuda tradisi Jawa, mengingat mereka adalah anak para priyai, dukungan mereka terhadap persatuan Indonesia sangat besar.

Ternyata setelah Kongres Jong Java di Mataram terlaksana, kekhawatiran tentang adanya perpecahan dalam tubuh Jong Java tidak terjadi. Di situlah terletak kedewasaan berfikir para pemuda yang tergabung Jong Java. Walaupun pada akhirnya memilih salah satu pilihan yaitu bergabung dalam satu kesatuan organisasi pemuda (fusi), kelompok yang tidak setuju fusi tetap mendukung keputusan kongres tersebut. Para anggota Jong Java rela berkorban dengan membubarkan organisasinya untuk tujuan persatuan nasional.

Kongres Mataram menyetujui fusi tetapi dengan jeda waktu persiapan. Pada waktu persiapan itu dibentuk Komisi Persiapan pada setiap cabang. Komisi itu harus membuat program kerja, penetapan status setiap cabang dan anggaran rumah tangganya. Sebagai hasil Kongres Mataram disusunlah sebuah rencana proses fusi yang kemudian dikenal sebagai **15 Pasal Kongres Mataram** sebagai berikut :

- a. Jong Java menerima ide fusi.
- b. Sebelum melaksanakan fusi hendaknya ada waktu peralihan.
- c. Untuk ini dibentuk Komisi Persiapan (*Komisi van Voorbereiding*).
- d. Tiap organisasi yang akan ikut berfusi menempatkan dua orang dalam Komisi tersebut.
- e. Tiap perkumpulan peserta mempunyai satu suara.
- f. Komisi hendaknya dipimpin oleh organisasi - organisasi netral, dalam hal ini Perhimpunan Peladjar-Peladjar Indonesia (PPPI).

- g. Ketua Komisi mempunyai suara sebagai penasehat, jika pemungutan suara gagal, suara ketua menentukan.
- h. Sekretaris Komisi bertugas memberi laporan secara teratur mengenai tindakan-tindakan yang diambil kepada organisasi-organisasi peserta; laporan-laporan inipun diumumkan
- i. Komisi bertugas mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempercepat peleburan organisasi-organisasi pemuda (rencana kerja, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan kepanduan).
- j. Komisi menjamin bahwa waktu peralihan tidak merugikan.
- k. Komisi berhak membentuk sub komisi dan minta nasehat para ahli.
- l. Jika persiapan – persiapan telah dibuat untuk dinilai oleh macam-macam Kongres maka Komisi Persiapan dibubarkan; kemudian dibentuk Pengurus Besar fusi.
- m. Pengurus Besar terikat oleh putusan-putusan Komisi Besar selama putusan-putusan ini dapat dilaksanakan.
- n. Selama pekerjaan persiapan tersebut belum selesai Jong Java tetap bekerja seperti semula.

- o. Jika usul ini diterima maka Pengurus Besar Jong Java segera memberitahukan hal ini kepada organisasi-organisasi pemuda yang ada. (Abdul Rahman, 2003a:54)

Sesuai dengan tekad tersebut maka ketua baru Jong Java (*Bondvoorzitter Jong Java*), R. Koentjoro Purbopranoto, dibubuhi predikat “Ketua yang paling akhir” (Purbopranoto, 1978: 317). Pengurus Besar Jong Java yang lainnya adalah Soeprapto, Maroeto, Soerjadi, Soekirdjan, Soediman, dan Soeharto. (Abdul Rahman, 2003:53)



Pengurus besar Jong Java hasil Kongres ke XI di Yogyakarta tahun 1928, Soediman Kartohadiprodo duduk nomor 6 dari kiri.

Keputusan Kongres Mataram ini mendapat sambutan dan diterima baik oleh PPPI, Jong Sumatranen Bond dan Pemuda Indonesia. Jong Sumatranen Bond segera menyatakan akan ikut. Hal ini dibuktikan dengan mengirim pernyataan pada tanggal 25 Desember 1928. Pemuda Indonesia juga menyatakan akan ikut. Dalam pada itu pada tanggal 25 Desember 1928 Pemuda Indonesia di Jakarta mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: Jika ada perkumpulan lain yang mau mendirikan badan persatuan maka Pemuda Indonesia harus ikut. (Abdul Rahman, 2003b: 28)

## **Komisi Besar Indonesia Muda**

**DENGAN** disetujuinya fusi dalam Kongres XI Jong Java, Jong Java melakukan berbagai upaya untuk merealisasikan pembentukan wadah baru bagi pergerakan pemuda. Salah satu usaha yang dilaksanakan Jong Java adalah mengundang Jong Sumatranen Bond dan Pemuda Indonesia untuk membentuk Komisi Persiapan (*Komisi van*

*Voorbereiding*).

Atas undangan Pengurus Besar Jong Java, wakil-wakil Jong Java (R. Koentjoro Poerbopranoto, R. T. Soenardi Djaksodipoero, Soediman Kartohadiprodjo), Jong Sumatranen Bond (Muhammad Yamin, Kroeng Raba Nasoetion, Adnan Kapau Gani), Pemuda Indonesia (R. M. Joesoepadi Danoehadiningrat, Moeljadi Dwidjodarmo, Mohamad Tamzil) mengadakan rapat yang pertama di gedung *Indonesische Clubhuis* jalan Kramat 106 Jakarta pada tanggal 25 Mei 1929. (Persatoean Indonesia, 1 Oktober 1929: 3)

Dalam pertemuan itu, Jong Java menyampaikan usul yang terdiri dari 15 pasal Mataram (putusan kongres Mataram). Dari lima belas pasal yang diusulkan Jong Java, empat belas pasal diterima, satu pasal ditolak. (Persatoean Indonesia, 1 Oktober 1929: 3)

Hasil dari pertemuan tersebut adalah terbentuknya Komisi Besar Indonesia Muda. Anggotanya berasal dari wakil-wakil organisasi tersebut. Jabatan ketua diserahkan kepada Ketua Jong Java, sekretaris kepada Ketua Pemuda Indonesia. Susunan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Penasehat : R. T. Soenardi Djaksodipoero  
 (Wongsonagoro);

Ketua : Koentjoro Poerbopranoto (Jong Java);

Wakil Ketua : Muhammad Yamin (Jong Sumatranen  
 Bond);

Sekretaris I : R.M. Joesoepadi Danoehadiningrat  
 (Pemuda Indonesia)

Sekretaris II : Mohamad Tamzil; (Pemuda Indonesia) ;

Bendahara : Assaat Dt Muda (Jong Sumatranen Bond);

Anggota: Soediman Kartohadiprodjo (Jong Java),  
 Adnan Kapau Gani (Jong Sumatranen Bond).  
 Kroeng Raba Nasution ( Jong Sumatranen  
 Bond )



Komisi Besar Indonesia Muda (KBIM) dari kiri ke kanan (berdiri) A.K. Gani, Asaat, Kroeng Raba Nasoetion, Soediman Kartohadiprodjo, M. Tamzil, (duduk) Mr. R.T. Soenardi Djaksodipoero, M. Yamin, R.K. Poerbopranoto (Ketua), M. Joesoepadi Danoediningrat

Komisi bertugas membuat rancangan dan aturan dalam kaitannya dengan pendirian Indonesia Muda sebagai pengganti organisasi pemuda yang ada. Karena pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Komisi Besar, maka segala hal urusan diserahkan kepada Komisi Besar. Dengan kata lain, Komisi Besar menjalankan fungsi sebagai Pengurus Indonesia Muda. Oleh karena itu, Komisi tetap tinggal sampai dengan Kongres Pertama Indonesia Muda yang selambat-lambatnya akan dilaksanakan dalam bulan Desember 1930. Tempat dan waktu akan ditentukan kemudian setelah bermusyawarah dengan cabang-cabang. Hal ini dilakukan karena kalau dipilih pengurus baru dikhawatirkan tidak memahami keadaan perkumpulan masing-masing dan mengerti betul apa maksudnya Anggaran Dasar yang disusun oleh Komisi Besar Indonesia Muda. Komisi Besar Indonesia Muda juga bertanggung jawab atas pembentukan cabang-cabang Indonesia Muda. (Abdul Rahman, 2003b: 29-30)

Setelah ditetapkan bagaimana pekerjaan dan kewajiban Komisi Besar Indonesia Muda, serta bagaimana rapat-rapat harus dilangsungkan, Komisi Besar Indonesia Muda memutuskan untuk mengadakan rapat kedua pada tanggal 25 Mei 1929, di *Indonesische Clubhuis* Jakarta. Dalam rapat yang dipimpin Muhammad Yamin itu, hadir wakil-wakil Jong Java, Jong Sumatranen Bond, dan Pemuda Indonesia.

Dalam rapat itu, Muhammad Yamin meminta supaya notulen disiarkan di surat kabar supaya diketahui apa yang dikerjakan oleh pemuda-pemuda itu. Permintaan itu diterimanya, akan tetapi jika perlu Komisi berhak untuk tidak menjalankan putusan itu.

Mengenai pengambilan keputusan, Muhammad Yamin mengusulkan agar putusan diambil dengan suara terbanyak. Jika ada perkumpulan yang tidak hadir, rapat untuk mengambil keputusan harus diundur atau hanya membicarakan hal-hal yang perlu saja. Peserta rapat menerima usul Yamin tersebut.

Tentang administrasi, Yamin mengusulkan supaya perhimpunan yang ikut dalam badan fusi membayar iuran kepada *Komisi* untuk keperluan administrasi sebesar *f*2,50,- (dua setengah gulden) setiap bulan. (Abdul Rahman, 2003b: 31)

Karena menurut putusan persidangan yang baru lalu, pimpinan sidang dan sekretaris harus berganti-ganti, maka R.M. Joesoepadi Danuhadiningrat mengusulkan supaya diadakan seorang *administrateur*. Terpilih sebagai *administrateur* adalah R. M Joesoepadi Danuhadiningrat. (Abdul Rahman, 2003b: 31)

R. Koentjoro Poerbopranoto mengusulkan asas-asas yang harus diperhatikan sebagai berikut badan persatuan harus tetap berupa perserikatan pemuda dan tidak boleh terjun ke dalam politik praktis, badan persatuan harus berazas Kebangsaan Indonesia, memperkuat perasaan persaudaraan antara anggota-anggotanya. Kepentingan dan permintaan seluruh pemuda Indonesia harus diperhatikan dan dipenuhi sebisa-bisanya. Koentjoro juga meminta komisi harus bekerja dengan praktis. Perselisihan harus dihindarkan sedapat-dapatnya.

Permintaan yang diajukan oleh Poerbopranoto itu disetujui oleh wakil-wakil perhimpunan yang hadir. Permintaan itu diterima dengan tidak mengadakan pemungutan suara.

Muhammad Yamin minta supaya Komisi mengadakan suatu rancangan kerja, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. R. Koentjoro Poerbopranoto sependapat dengan usul Yamin, tetapi hal Anggaran Dasar harus ditetapkan oleh *Gecombineerd Komisi* pada akhirnya. Lain daripada itu Jong Java akan mengadakan kongres satu kali lagi, di mana Komisi akan mengirimkan wakilnya untuk merembuk tentang *Huishoudelijk - Reglement* (Anggaran Rumah Tangga).

Djaksodipoero berpendapat lebih baik Komisi hanya membuat rancangan yang kemudian diserahkan kepada Pengurus Besar masing-masing perkumpulan untuk dibahas di dalam masing-masing kongresnya. Hal Komisi mengirim wakil itu tergantung Pengurus Besar masing-masing. Jika dianggap perlu boleh mengundang Komisi.

Dari hasil diskusi dalam itu, akhirnya sidang mengambil keputusan sebagai berikut: Dari *Komisi*

diadakan satu *Komite* (Komisi Kecil) yang akan membuat *ontwerp-perjalanan* dan *statuten* dan *Huishoudelijk Reglement*. Yang ditetapkan menjadi anggota Komite yaitu Djaksodipoero, Muhammad Yamin, dan RM Joesoepadi Danuhadiningrat. Komisi Kecil bertugas menyusun Rancangan Anggaran Dasar (Statuten), Anggaran Rumah Tangga (Houshoudelijk Reglement), Aturan Pembubaran dan Aturan Mendirikan perkumpulan baru. Aturan ini diberi nama “Aturan Pendirian.”

Aturan itu kemudian ditetapkan pada 27 Oktober 1929 dalam Rapat Ketiga. **Aturan Mendirikan Indonesia Muda** terdiri atas 7 pasal yaitu :

Pasal 1

Komisi yang didirikan oleh Pengurus Besar Perkumpulan yang tiga tersebut tinggal tetap sampai ke kongres pertama, yang diadakan oleh perkumpulan Indonesia Muda.

Pasal 2

Kongres yang tersebut dalam pasal 1 diadakan selambat-lambatnya dalam bulan Desember 1930.

Di Kongres ini Komisi lalu turun dan diganti dengan Pengurus Besar Indonesia Muda, seperti tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 3

Tiap-tiap perkumpulan mengadakan kongres pembubaran, Pengurus Besar meletakkan jabatannya dan urusan perkumpulan lalu diserahkan kepada Komisi, sampai pada waktu tersebut dalam pasal 2 dan 7.

Keadaan cabang-cabang tinggal tetap sampai pada waktu yang tersebut dalam pasal 6.

#### Pasal 4

Ketiga-tiga kongres pembubaran dalam pasal 3 diadakan selambat-lambatnya permulaan bulan Maret 1930.

#### Pasal 5

Di Kongres pembubaran rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dibicarakan.

Segala perubahan diurungkan sampai ke kongres pertama seperti tersebut dalam pasal 2.

## Pasal 6

Cabang-cabang Indonesia Muda didirikan sesudah kongres pembubaran (pasal 3).

Untuk mengubah dan mempersatukan cabang-cabang pada satu negeri seboleh-bolehnya dilakukan selambat-lambatnya bulan Agustus 1930, segala cabang ini didirikan dengan upacara mengundang komisi, serta tinggal di bawah pemandangan dan atas tanggung jawabnya sampai ke waktu tersebut dalam pasal 2.

## Pasal 7

Perkumpulan Indonesia Muda didirikan dalam suatu kongres pendirian dengan segala upacara (pasal 2) Tanggal dan tempatnya ditentukan Komisi.

Sesudah tanggal ini nama Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Pemuda Indonesia dan lain-lain dihapuskan (pasal 1 dan 2)

Untuk kepentingan penyelenggaraan Kongres Pertama Indonesia Muda, Komisi Besar menyusun Panitia Kerapatan

(Kongres) Besar Indonesia Muda, sebagai berikut :

Ketua	: Wawardi
Wakil Ketua	: R. M. Rasdiman
Juru Surat I	: S. Danusaputro
Juru Surat II	: Sudarsono
Bendahara	: Sudibyso
Pembantu	: G. Wreksoatmodjo; R. M. Ng. Dar-

wanto Soerjodarmodjo; Amir Hamzah;  
Surasno; Mr. R. T. Wongsonagoro  
(Abdul Rahman, 2003b: 34-35)

## **Kongres Pembubaran Organisasi Pemuda**

**DENGAN** disetujuinya Aturan Mendirikan Indonesia Muda pada tanggal 27 Oktober 1929, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, dan Pemuda Indonesia kemudian mengadakan persiapan untuk Kongres Pembubaran. Yang pertama kali melaksanakan kongres pembubaran adalah Jong Java di



Kongres XII Jong Java di Semarang, tanggal 23-31 Desember 1929.  
Keputusan adalah pembubaran Jong Java

Semarang pada tanggal 23 – 31 Desember 1929, saat pelajar sebagian besar libur. (Abdul Rahman, 2003b: 36)

Dalam Kongres pembubaran ini, Komisi Besar Indonesia Muda untuk pertama kalinya akan bertemu dengan cabang-cabang. Di sini Komisi Besar Indonesia Muda akan bermusyawarah untuk menentukan kapan cabang Indonesia Muda akan didirikan di tempat masing-masing. Dengan melihat kondisi sekarang, ada tiga model yang akan digunakan :

1. Di tempat yang tidak ada cabang Jong Java, Jong Sumatranen Bond, dan Pemuda Indonesia, seperti

Tasikmalaya, Makassar, dan Palembang, para pelajar boleh langsung mendirikan cabang pada awal tahun 1930 setelah meminta persetujuan Komisi Besar Indonesia Muda di Jakarta

2. Pada daerah yang terdapat cabang satu organisasi, misalnya di Padang Cuma ada Jong Sumatranen Bond, di Medan hanya ada Pemuda Indonesia, dan di Madiun hanya ada Jong Java, di sini cabang Indonesia Muda didirikan hanya dengan bertukar nama saja
3. Pada daerah yang terdapat cabang lebih dari satu perkumpulan misalnya Jakarta, Bogor, maka harus ditentukan siapa yang akan memimpin rapat sebelum pendirian cabang Indonesia Muda. (Abdul Rahman, 2003b: 36)

Dalam Kongres Jong Java XII, 23 – 29 Desember 1929, di Semarang rancangan organisasi pendirian badan fusi baru (Indonesia Muda) diterima baik. Rancangan ini dibuat oleh suatu komisi persiapan fusi, yang anggotanya terdiri dari anggota perkumpulan-perkumpulan pemuda

yang akan bergabung. Sesudah diterima baik, maka diambil keputusan pembubaran. Kepada perkumpulan yang baru diserahkan studiefonds, kepanduan dan 2500 anggota Jong Java.

Saat-saat yang paling mengharukan adalah saat penyerahan pimpinan oleh Pengurus Besar Jong Java terakhir kepada Komisi Besar Indonesia Muda. Seluruh anggota Komisi Besar Indonesia Muda saat itu hadir semua.

Dengan berdiri tegak, segenap hadirin mendengarkan putusan pembubaran yang dibacakan *Algemeene Technische Commissaris JJP*, Moewardi. Keputusan berbunyi sebagai berikut :

Pertama.

Sejak dari saat ini perkumpulan Jong Java, dahulu bernama Tri Koro Dharmo, tidak berdiri lagi.

Kedua.

Sejak dari saat ini segala cabang perkumpulan Jong Java dahulu bernama Tri Koro Dharmo, diserahkan kepada Komisi Besar Indonesia Muda

Ketiga.

Sejak dari saat ini segala cabang perkumpulan Jong Java dahulu bernama Tri Koro Dharmo, berdiri dibawah “pemandangan” Komisi Besar Perkumpulan Indonesia Muda dan wajib bersatu didalam perkumpulan ini. (Abdul Rahman, 2003b: 37-38)

Sesuai dengan Aturan Mendirikan Indonesia Muda, pada tanggal 27 Desember 1929, Komisi Besar Indonesia Muda menerima pimpinan Pengurus Besar Jong Java ditengah-tengah orang banyak untuk menerima penyerahan perkumpulan Jong Java dengan semua cabang-cabangnya.

Upacara penyerahan berjalan dengan khidmat dan baik dan memberikan kenang-kenangan yang baik bagi Jong Java yang telah berjuang dengan sukses sebagai pengabdian kepada tanah air dan bangsa. Dikubur dengan baik dan meninggalkan nama baik. Dengan menerima benih persatuan itu berarti keinginan Jong Java sudah tercapai yaitu peleburan yang sempurna dengan perserikatan-perserikatan pemuda lain atau tumbuh suatu organisasi yang besar dan kokoh untuk para pemuda dari seluruh tanah Indonesia, badan ini ialah perkumpulan baru; Indonesia Muda.

Sejak hari Jumat, 27 Desember 1929 atau 25 Rejeb 1860, Jong Java, dahulu bernama Tri Koro Dharmo, tidak berdiri lagi. Sejak saat ini berdirilah perkumpulan baru Indonesia Muda. Sebelum dilebur kedalam Indonesia Muda, Jong Java mempunyai 3 anggota kemuliaan, 1. 577 anggota biasa, 564 anggota luar biasa, 17 calon anggota dan 41 penderma. Angka-angka tersebut merupakan jumlah yang besar di tahun 1929. (Abdul Rahman, 2003b: 38-39)

## **Indonesia Muda**

**SETELAH** menjalankan tugasnya selama setahun. Komisi Besar Indonesia Muda menyelenggarakan kongres untuk mendirikan Indonesia Muda di Gedung Pertemuan Habiprojo, Solo, 30 Desember – 2 Januari 1931. kongres ini menandai berakhirnya tugas Komisi Besar Indonesia Muda. Dalam kongres itu nama-nama *Jong Java* , *Jong Sumatranen Bonds*, Pemoeda Indonesia, Jong Celebes, dan Sekar Roekoen tidak boleh lagi dipakai (*45 Tahun Sumpah Pemuda*, 1973 : 78).

Upacara pembentukan Indonesia Muda pada tanggal 31 Desember 1930 jam 12 malam dihadiri oleh utusan cabang-cabang Indonesia Muda dengan acara sebagai berikut :

1. menutup panji-panji,
2. peresmian Indonesia Muda,
3. pemilihan pengurus besar pengganti Komisi Besar Indonesia Muda. (Abdul Rahman, 2003b: 39-42)

Acara penutupan panji berisi acara pembacaan putusan kongres Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, dan Sekar Roekoen yang menyatakan akan berfusi ke dalam Indonesia Muda. Sebagai perlambang kelima perkumpulan tersebut sudah ditutup, maka panji-panji perkumpulan yang dipasang di atas panggung ditutup.

Pada rapat pendirian Indonesia Muda, semua cabang ditanya Komisi Besar Indonesia Muda apakah mereka sudah siap mendirikan Indonesia Muda. Setelah setuju, mereka kemudian membacakan Piagam Mendirikan

Indonesia Muda. Panji Komisi Besar Indonesia Muda yang berbentuk sayap garuda dengan keris yang bersinar di tengah kemudian dibuka dan dijadikan panji Indonesia Muda.

Rapat pendirian Indonesia Muda dihadiri oleh cabang PBKIM, Keputrian, Sidang Pengarang, dan SOMPI. Dalam kesempatan itu hadir Mr. R. T. Wongsonagoro, dr. Samsi Sastrowidagdo, Mr. Soerjadi, dan Mr. Singgih. Rapat dihadiri kira-kira 800 orang. (Abdul Rahman, 2003b: 43)

Rapat berikutnya adalah pemilihan Ketua Pengurus Besar Indonesia Muda (PBIM). Rapat dimulai pukul 09.<sup>45</sup> WIB. Dalam pemilihan Ketua, PBIM Cabang Mataram mengusulkan Koentjoro Purbopranoto, Joesoepadi Danoehadiningrat, dan Adnan Kapau Gani. Ketiganya menolak pengusulan tersebut. Komisi Besar IM mengusulkan Soewadji Prawirohardjo, bendahara II Komisi Besar Indonesia Muda, sebagai ketua. Usulan itu diterima dengan suara bulat. Susunan PBIM 1931 selengkapnya adalah sebagai berikut :

Ketua : Soewadji Prawirohardjo

Wakil Ketua : Joesoepadi Danoehadiningrat  
Penulis I : Mohamad Tamzil  
Penulis II : Roesmali  
Bendahara I : Hinoerimawan  
Bendahara II : Kanoejoso  
Pembantu : G. R. Pantouw  
Adnan Kapau Gani  
Kajatoen

Setelah Ketua Pengurus Besar Indonesia Muda yang pertama, Soewadji Prawirohardjo, dilantik dan mengucapkan pidato singkat, Mr. Singgih naik ke atas panggung. Beliau menyerahkan sebuah piagam tembaga bertuliskan :

*“Majelis Pertimbangan PPPKI memberi selamat putera dan puteri Indonesia sudah bersatu dalam Perkumpulan Indonesia Muda. Surakarta, 31 Desember – 2 Januari 1931”.* (Abdul Rahman, 2003b: 44)

Kemudian Mr. Sujudi, utusan HB PNI menyerahkan sebuah palu dari perak sebagai lambang kepemimpinan Indonesia Muda. Kongres menetapkan tujuan Indonesia Muda sebagai berikut :

*“memperkuat rasa persatuan di kalangan pelajar-pelajar, membangunkan dan mempertahankan keinsafan, diantaranya bahwa mereka adalah anak satu bangsa yang bertanah air satu, agar tercapailah Indonesia Raya”*

Dengan mengakui dan menghargai peradaban dan kebudayaan golongan bangsa Indonesia masing-masing, maka Indonesia Muda memajukan peradaban umum Indonesia dan dalam pergaulan memakai bahasa Indonesia. Sembojannya ialah satu tanah air satu bangsa. Untuk mencapai tujuannya Indonesia Muda akan memajukan rasa saling menghargai di antara anak Indonesia, akan bekerjasama dengan lain-lain perkumpulan, akan mengadakan kursus-kursus mempelajari bahasa persatuan dan kursus-kursus abc, akan memajukan olah raga. Hal

yang penting ialah pasal dalam peraturan dasar yang menetapkan bahwa perkumpulan Indonesia Muda dan anggotanya secara sendiri-sendiri tidak akan menjalankan politik.

Indonesia Muda mempunyai 26 cabang yang tersebar di kota-kota besar Indonesia. Cabang terbesar pertama adalah Jakarta disusul oleh Surakarta (Soediro, 1978 : 383) Dari 26 cabang, 17 diantaranya adalah cabang Keputrian Indonesia Muda. Secara keseluruhan anggotanya berjumlah 2400 orang. (Abdul Rahman, 2003b: 45-46)

## **Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia**

DI penghujung tahun 1925, sekelompok mahasiswa Rechtshogeschool (RHS, Sekolah Hakim Tinggi) dan siswa kelas atas School tot Opleiding van Inlandsch Artsen (Stovia, Sekolah Dokter Bumiputera) mengadakan diskusi di Gang Rijkman dan Fromberg Park, Weltevreden. Mahasiswa yang sering hadir dalam diskusi tersebut adalah

Soewirjo, Oesman Sastroamidjojo, Moeksinoen, Sigit, Goelarso, Darwis, Soerjono, Soesalit, dan Soegondo (45 Tahun Sumpah Pemuda, 1974 : 211).

Dalam pembicaraan yang diadakan secara informal tersebut, mereka berkesimpulan bahwa mereka tidak hanya mencari ijazah, tetapi juga harus ikut memikirkan soal-soal yang menyangkut kehidupan masyarakat. Dari diskusi-diskusi tersebut timbulah gagasan untuk mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (45 Tahun Sumpah Pemuda, 1974 : 211).

Hasil pertemuan pendahuluan ini kemudian dilanjutkan di Yogyakarta dengan memanfaatkan Kongres Jong Islamieten Bond yang dilaksanakan pada tanggal 25 - 27 Desember 1925. Kongres dihadiri undangan yang mencapai 47 macam organisasi pergerakan di Indonesia. Kongres juga dihadiri tokoh-tokoh antara lain Dwidjosewojo dari Budi Utomo, H. Fachrudin, Ki Hadjar Dewantara, Dr. Satiman Wiriosandjojo, Gondoatmodjo, Surjopranoto, dan H.O.S. Tjokroaminoto.

Setelah kongres JIB, para mahasiswa itu kemudian bertemu lagi di Bandung dengan memanfaatkan Kongres

Jong Java Kedelapan, 28 Desember 1925 – 2 Januari 1926. Kongres ini banyak membahas persoalan politik yang sedang terjadi. (Abdul Rahman, 2006b: 11)

Pada kongres Jong Java tersebut, para mahasiswa terpengaruh pendapat Tabrani, seorang jurnalis Surat Kabar Hindia Baroe, yang sejak 1916 aktif di Jong Java. Ia mengemukakan perlunya persatuan bagi segenap rakyat yang ada di Hindia Belanda. Persatuan itu bukannya suatu hal tidak mungkin tercapai jika perasaan kesadaran akan keberadaan dirinya dalam lingkup terjajah telah muncul, sebagaimana ia katakan :

*Rakyat Hindia Belanda merasa bahwa bangsa Jawa, Sumatera, Ambon, Manado, Sunda, dan sebagainya sebetulnya terperintah oleh pemerintahan yang satu, yang kelak oleh kita sendiri akan digantinya. Pemimpin Jawa diwajibkan memperbaiki keadaan di Jawa, pemimpin Sumatera diwajibkan meningkatkan derajat tanah Sumatera, begitu juga pemimpin – pemimpin lainnya harus senantiasa cari akal supaya familinya, kampungnya, dan pulaunya masing-masing harus dijaga jangan sampai*

*menimbulkan perselisihan diantara anak-anak Hindia yang ada dan kebencian yang terkandung di dalam penghidupan sehari-hari tidak boleh sama sekali dibawa ke medan pergerakan.” (Abdul Rahman, 2003a: 31)*

Setelah melewati beberapa pertemuan, seperti yang disebutkan di atas, akhirnya gagasan untuk membentuk perhimpunan mahasiswa terwujud pada September 1926. Perhimpunan mahasiswa yang baru didirikan diberi nama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia disingkat PPPI atau De indonesische Studenten Unie (Wilopo 70 Tahun, 1979 : 308). Abdoellah Sigit, seorang mahasiswa RHS, terpilih sebagai ketua. Saat itu, usulan menggunakan istilah mahasiswa seperti yang diusulkan Muhammad Yamin belum diterima secara umum mengingat istilah maha dianggap sesuatu yang terlalu tinggi.

Keanggotaan PPPI terbatas pada kalangan mahasiswa, selain mahasiswa tidak dapat diterima menjadi anggota. Mahasiswa-mahasiswa itu berasal dari Sekolah

Hakim Tinggi (RHS), Sekolah Teknik Tinggi (THS), dan siswa kelas-kelas tertinggi STOVIA (kelas 7–10). Sesudah dibukanya Sekolah Kedokteran Tinggi (GHS) pada tahun 1927, keanggotaannya bertambah dengan mahasiswa GHS.

Sementara itu, pada tahun 1927 Soediman mulai memasuki bangku kuliah. Setelah statusnya resmi sebagai mahasiswa GHS, Soediman langsung terlibat aktif dalam kegiatan PPPI cabang Batavia.

Cabang-cabang PPPI hanya terdapat di kota-kota yang mempunyai perguruan tinggi yaitu Batavia, Bandung, dan Surabaya. Pada tiap-tiap sekolah tersebut didirikan cabang PPPI. Menurut R. Katjasungkana (Bunga Rampai Sumpah Pemuda, 1978 : 365), Sigit yang menempuh pendidikan AMS-nya di Bandung menemui sendiri mahasiswa di Bandung untuk mendirikan cabang PPPI di Bandung.

Karena keanggotaannya terbatas pada kalangan mahasiswa, anggota PPPI merupakan klub kecil dengan anggota sekitar 30 orang. Kebanyakan anggota berasal dari perhimpunan-perhimpunan pelajar kesukuan, dan sering

kali juga masih aktif dalam perhimpunan-perhimpunan tersebut, misalnya seperti Soediman Kartohadiprodjo, Goelarso, Abdoellah Sigit, dan Koentjoro (Jong Java), Aboe Hanifah dan Yamin (Jong Sumatranen Bond), dan Amir Sjarifoeddin (Jong Bataks Bond).

## **Studenten Islam Studieclub**

**PADA** bulan Desember 1934 berdiri organisasi Studenten Islam Studieclub (SIS). Tujuan organisasi itu adalah untuk menambah pengetahuan tentang nilai-nilai keislaman bagi para mahasiswa. Bentuk kegiatan dari organisasi itu berupa diskusi permasalahan yang aktual pada masa itu melalui sudut pandang Islam. Kepedulian nilai-nilai keislaman tumbuh di kalangan sebagian mahasiswa termasuk Soediman disebabkan oleh kerisauan di kalangan mereka sendiri terhadap arus pemikiran dan pergaulan gaya barat.

Soediman yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga priyayi, telah dididik dengan nilai-nilai Islam dan

Jawa dalam keluarganya, tertarik dengan tujuan dari organisasi itu. Ia merasa selama menempuh pendidikan di sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi pengetahuan yang ia dapat hanya pengetahuan barat. Untuk itu ia berusaha mengimbangnya dengan pengetahuan tentang Islam yang merupakan dasar keyakinannya.

Berkat kegiatan SIS ini banyak cendekiawan muslim muda yang tetap tekun menuntut ilmu pengetahuan tercegah meluncur jauh dari ajaran-ajaran Islam, sementara mereka tetap tekun menuntut ilmu pengetahuan. (Abdul Rahman, 2006a: 74)

Pendirian organisasi Studenten Islam Studieclub (SIS) dipelopori oleh Jusuf Wibisono dan Mohammad Roem. Keduanya kemudian menjadi tokoh-tokoh dalam kepengurusan awal organisasi tersebut. Pada saat SIS berdiri telah ada beberapa organisasi pelajar dan mahasiswa Islam, salah satunya adalah Jong Islamieten Bond. Walaupun mempunyai persamaan dalam kriteria menjaring keanggotaan, SIS dan Jong Islamieten Bond tetap hidup dan bersaing secara sehat.

Pada awal SIS didirikan Soediman sudah terlibat di dalam kegiatannya. Soediman merasa tujuan dari organisasi itu sesuai dengan aspirasinya. Setelah kegiatan SIS berjalan selama setahun, Soediman terpilih menjabat sebagai ketua “Studenten Islam Studie Club”. Kepengurusan Soediman berlangsung dari tahun 1935 sampai dengan tahun 1936. Pada tahun itu Soediman memasuki masa akhir kuliahnya di GHS. (Murniatmo, 1983:69)

## **Bab 4**

# **Keluarga dan Karier**

### **Keluarga Mr. Soediman**

**PADA** tanggal 26 Desember 1936, Mr. Soediman melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Oetariah Koesoemo Oetojo. Raden Ajeng Oetariah Koesoemo Oetojo adalah anak Raden Mas A.A. Koesoemo Oetojo yang pernah menjabat sebagai bupati Ngawi, Jepara dan menjadi anggota Volksrad. Setelah pensiun Raden Mas Koesoemo Oetojo pindah ke Yogyakarta, dan terakhir bertempat

tinggal di Kebon Sirih, Jakarta. Ibu dari Raden Ajeng Oetariah adalah Raden Ayu Ataswarin Boeminoto asal Yogyakarta. (Soelasbawati, t.t : 58)



Foto Pernikahan Mr. Soediman Kartohadiprodjo, 26 Desember 1936

Akad pernikahan Mr. Soediman dengan Raden Ajeng Oetariah Koesoemo Oetojo dilangsungkan di rumah Raden Mas A.A. Koesoemo Oetojo yang beralamat di jalan Kebon Sirih No. 36, Jakarta. Beberapa hari kemudian setelah akad

78

nikah dilaksanakan upacara ngunduh mantu oleh Raden Ayu Oemi Kartohadiprodjo di Karrenweg, Semarang. Kedua mempelai diikat dengan selendang dan didudukkan di kursi pengantin pelaminan. (Soelasbawati, t.t : 58)

Kisah cinta Mr. Soediman dan Oetariah bersemi di Jakarta, ketika Mr. Soediman masih menjadi mahasiswa sedangkan Oetariah tinggal bersama ayah bundanya di Kebon Sirih, Jakarta. Rasa cinta itu diawali dari pertemuan mereka yang sama-sama aktif di Jong Java. Saat itu Oetariah masih berstatus pelajar MULO dan Mr. Soediman sebagai mahasiswa di RHS. Mereka berdua sering mendatangi ceramah-ceramah yang disampaikan tokoh-tokoh politik pada waktu itu, antara lain Mohammad Husni Thamrin. Pertemuan mereka yang rutin membuat perkenalan semakin akrab yang akhirnya membuah cinta sejati (A. Soehardi, 1996: 26-36)

Kegiatan Oetariah dalam organisasi Jong Java didukung sepenuhnya oleh sang ayah. Menurut R.M. A.A. Koesomo Oetojo dengan berorganisasi orang akan bertambah pengalaman dan pengetahuannya di luar sekolah

serta belajar hidup bermasyarakat. R.M. A.A. Koesoemo Oetoyo sendiri aktif dalam perkumpulan Boedi Oetomo sebagai terakhir, bahkan duduk sebagai anggota Volksraad . (A. Soehardi, 1996: 36)

Dari perkawinan itu lahir putra-putri yang semuanya berjumlah sembilan orang, yaitu: Achmad Soehardi, Mohammad Harjono, Bambang Utojo, Indrarto, Indrarti, Budiono, Pramono, Indun Lestari dan yang terakhir Pramudji Rahardjo. Di antara kesembilan putra-putri itu, putra keempat dan kelima terlahir kembar. (A. Soehardi, 1996: 26)



Keluarga Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodo

Sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab pada masa depan putra-putrinya, Mr. Soediman selalu memberikan petunjuk dan nasihat kepada mereka. Intinya adalah perjuangan yang baik adalah perjuangan yang dilandasi kejujuran. Nasihat selalu disampaikan dalam setiap kesempatan, khususnya di saat makan bersama-sama. Bahkan beberapa hari sebelum menghembuskan nafas terakhir, Mr. Soediman masih sempat berpesan kepada putra-putrinya, “Hendaklah dalam hidup ini kalian harus jujur, sebab kalau orang jujur dalam hidupnya maka hidupnya tidak akan terlantar”. (A. Soehardi, 1996: 27)

Dalam membina keluarga antara Mr. Soediman dan Oetariah terjalin pengertian yang amat mendalam. Sehingga kehidupan keluarganya sangat bahagia. Menurut kawan dekat Oetariah, kepribadian Mr. Soediman dan Oetariah sangat cocok dan harmonis. (A. Soehardi, 1996: 27)

## **Karier di Masa Hindia Belanda**

**KETIKA** sedang menyelesaikan skripsinya di RHS, Soediman mendapat berita duka tentang meninggalnya sang ayah. Kabar itu memberikan tanggung jawab baru bagi Soediman sebagai anak tertua untuk menjadi kepala keluarga menggantikan sang ayah. Peran itu menuntut kemandirian bagi sosok Soediman apalagi pada saat itu hubungannya dengan Oetariah akan memasuki gerbang pernikahan. Tiada pilihan lain bagi Soediman kecuali memfokuskan diri untuk mencari nafkah bagi keluarga. Hal itu memaksa Soediman meninggal dunia organisasi kepemudaan.

Dua bulan setelah meresmikan pernikahannya dengan Oetariah, Mr. Soediman mulai meniti karier sebagai volunter pada Kantor Gubernur bagian Perundang-undangan Provinsi Jawa Timur. Sebagai volunter Mr. Soediman tidak menerima gaji sesuai dengan pendidikannya. Ia hanya menerima gaji f 20 ,- (dua puluh gulden) sampai dengan f 30,- (tiga puluh gulden). Padahal seorang sarjana pada yang baru lulus, seperti Mr. Soediman jika bekerja sesuai dengan formasinya dapat menerima gaji

f100,- (seratus gulden). Walaupun demikian, Mr. Soediman tetap menerima pekerjaan itu sebagai pengalaman. (A. Soehardi, 1996: 47)

Sebenarnya Mr. Soediman ingin menerapkan ilmunya di bidang yang sesuai dengan pengetahuan yang dia pelajari. Oleh sebab itu, ia mencoba melamar ke Departemen Kehakiman. Dari Departemen Kehakiman, Mr. Soediman mendapat jawaban bahwa ada lowongan pekerjaan untuknya. Namun lowongan itu tetap sama sebagai volunter dengan gaji yang lebih tinggi f 50,- (lima puluh gulden) perbulan. atas saran Oetariah, Mr. Soediman membicarakan perihal lowongan tersebut kepada pembimbing akademiknya, Profesor Logeman, guru besar di Rechtskundige Hooge School . Atas saran Profesor Logeman, Mr. Soediman menerima dan mengisi lowongan di Departemen Kehakiman itu, dan meminta berhenti dari kantornya di Surabaya. (A. Soehardi, 1996: 48)

Pada 19 Nopember 1936, Mr. Soediman dinyatakan resmi diterima di Departemen Kehakiman dan mulai saat itu resmi menjadi volunter di Pengadilan Negeri Tanjung

Karang. Selama bekerja di Tanjung Karang, Mr. Soediman aktif dalam kegiatan sosial sebagai anggota Societeit Indonesia Tanjung Karang dan anggota Panitia Persiapan setempat Transmigrasi Intelektual Indonesia, Tanjung Karang.

Tugas di Tanjung Karang hanya dijalani Mr. Soediman selama tujuh bulan. Kemudian, pada tahun 1937, ia dipindahkan ke Garut Jawa Barat. Di Garut, Mr. Soediman berdinan agak lama, yaitu sampai tahun 1938. ketika bekerja di Pengadilan Garut, status Mr. Soediman berubah dari volunteer menjadi pegawai tetap. (A. Soehardi, 1996: 75-79)

Setelah selesai menjalani tugas di Garut, Mr. Soediman dipindhkn ke Semarang, Jawa tengah. Di Semarang, Mr. Soediman ditempatkan sebagai kepala bagian kepaniteraan kriminal pada Pengadilan Tinggi di Semarang. Selama bekerja di Semarang, Mr Soediman aktif dalam kegiatan sosial sebagai anggota Studie Club Semarang.

Karena cuaca Semarang tidak cocok bagi kesehatan Mr. Soediman, pada tahun 1939 Mr. Soediman dipindahkan kembali ke Garut. Antara tahun 1939 sampai dengan tahun 1942, Mr. Soediman ditempatkan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Garut merangkap Hakim Pengadilan Kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi Garutm Tasikmalaya, dan Ciamis. Selama bekerja di Garut, Mr. Soediman aktif dalam kegiatan sosial sebagai ketua Centrale Crediet Cooperatie Garut. (Murniatmo, 1983: 67)

## **Karier di Masa Pendudukan Jepang**

**MR. SOEDIMAN** dan keluarga tinggal di Garut sampai dengan tahun 1944. Pada tahun 1942, di saat Jepang masuk ke Indonesia, kedudukannya sebagai Kepala Pengadilan Negeri Garut tidak berubah begitu pula statusnya sebagai Hakim Pengadilan Kepolisian.

Ketika menjabat ketua pengadilan di Garut, Mr. Soediman selalu bersikap tegas dan bijaksana terhadap siapapun, termasuk kepada tentara pendudukan Jepang

yang terkenal sangat kejam. Hal itu terlihat dalam suatu peristiwa ketika Mr. Soediman sedang memimpin sidang di pengadilan Garut, masuklah tentara Jepang dengan tanpa membuka topinya. Padahal menurut tata tertib persidangan, pengujung sidang yang mengenakan topi harus membukanya, dan itu harus ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali. Maka sebagai pimpinan sidang, Mr. Soediman meminta agar tentara Jepang itu membuka topinya. Tapi tentara Jepang itu menolaknya. Alasannya, yang memerintahkan adalah hakim berbangsa Indonesia. Dengan bijaksana Mr. Soediman pun menunjuk bendera Jepang Hinomaru, yang dipasang di belakang kursi ketua sidang, sambil berkata, “Kalau Tuan tidak membuka topi yang Tuan pakai itu, berarti Tuan tidak lagi menghormati bendera yang ada di belakang saya ini. Dan bagaimana nantinya kalau Tuan tetap pada sikap Tuan untuk tidak membuka topi”. Mendengar itu dan melihat ada bendera Jepang dipasang di ruang sidang, tentara yang disiplin itu akhirnya mau juga membuka topinya. Ia kemudian menundukkan kepala di muka ketua sidang sebagai tanda penghormatan. (A. Soehardi, 1996: 45)

Pada tahun 1944 Mr. Soediman dimutasi ke Jakarta. Di tempat tugas yang baru ini, Mr. Soediman menjabat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta dan Tangerang (Murniatmo, 1983: 67). Kedudukannya itu bertahan hingga Jepang menyerah tanpa syarat terhadap Sekutu tahun 1945.

## **Bab 5**

# **Pengabdian Pada Republik**

### **Pegawai Republik**

**SETELAH** Proklamasi Kemerdekaan diumumkan pada 17 Agustus 1945, segenap rakyat menyambutnya dengan sukacita. Setiap putra bangsa mempersiapkan diri untuk mendukung dan memperkuat negara yang baru lahir. Mereka yang pernah mendapatkan pendidikan militer baik itu masa kolonial Hindia Belanda, maupun masa

pendudukan Jepang bergegas menyusun institusi militer baru, begitu pula mereka yang pernah berkiprah di bidang hukum juga bergegas menyusun institusi birokrasi hukum baru. Di tengah gelombang revolusi itu Soediman diajak bekerja sama oleh Profesor Mr. Moeljatno untuk berkiprah di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Agung adalah Mr. Kasman Singodimedjo.

Pengangkatan Soediman di lingkungan Kejaksaan Agung didasari surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1945 Nomor A.860. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Soediman dipekerjakan sebagai pembantu Jaksa Agung yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 1946, Soediman diangkat sebagai Jaksa Tinggi Tingkat I, berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 27 Maret 1946. Soediman menerima beban tugas untuk mewakili Jaksa Agung jika berhalangan dan memimpin serta mengawasi seluruh pekerjaan kejaksaan sehari-hari. (Catatan Mr. Soediman, t.t.)

Tahun 1947, tugas Soediman dialihkan dari Kejaksaan ke Kementerian Kehakiman. Di Kementerian Kehakiman Soediman ditugaskan menjadi Hakim di Pengadilan Tinggi Republik Indonesia yang berkedudukan di Tangerang. (Catatan Mr. Soediman, t.t.)

## **Pengacara Pejuang**

**PADA** tahun 1946, di sela-sela kesibukan pekerjaannya, Soediman menjadi pengacara pokrol bambu. Profesi ini sangat disukai Soediman, sebab ia bisa lebih bebas bekerja dan tidak terikat oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Nederlands Indies Civil Administration (NICA) Belanda. Pada saat itu Jakarta sudah dikuasai NICA yang didukung oleh tentara Sekutu. NICA masuk ke Indonesia dengan membonceng pendaratan pasukan Sekutu yang datang pada bulan Oktober 1945.

Setelah kedatangan NICA situasi di Jakarta sangat membahayakan bagi tokoh-tokoh republik. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan para

pejabat penting lainnya akhirnya hijrah ke Yogyakarta yang kemudian menjadi ibukota Negara RI pada saat itu. Di Jakarta hanya Perdana Menteri Sjahrir dan beberapa pejabat RI lainnya, termasuk Soediman yang bekerja di daerah pendudukan (Jakarta).

Profesi ganda yang dilakukan Soediman sebagai pegawai kehakiman RI sekaligus pengacara bukan didasari untuk mencari keuntungan materi, tetapi oleh rasa panggilan hati melihat situasi politik di Jakarta pada saat itu. Karena para pejuang RI yang tertangkap NICA di daerah pendudukan membutuhkan perlindungan hukum ketika diadili di muka sidang. Pada saat itu peran pengacara yang pro republik sangat dibutuhkan untuk membela para pejuang tersebut, sementara perangkat hukum RI tidak diakui oleh pemerintahan NICA.

Sebagai pengacara pokrol bambu Soediman hanya diperkenankan duduk di ruang sidang pada deretan bangku belakang. Lain halnya dengan advokat, sebagai pengacara resmi yang diakui pemerintahan NICA, diperkenankan duduk di barisan depan. Mengetahui hal itu para advokat

yang terdiri dari Mr. Loekman Wiriadinata, Mr. Zainal Abidin, Mr. Paul Hakim, Mr. Soetjahjo, Mr. Roosdiono meminta Soediman bergabung untuk menjadi advokat, meski tidak menyatakan sumpah setia kepada Ratu Belanda. Menyangkut tugas dan kewajiban Soediman hanya mau menyatakan sumpah setia kepada pengadilan. Hal itu merupakan prinsip dari Soediman yang tidak bisa ditawar lagi. Akhirnya prinsip Soediman itu bisa diterima oleh teman-temannya, dan sejak itu menjalankan tugas sebagai advokat. (A. Soehardi, 1996: 44)

Beberapa kiprah Soediman sebagai pengacara pejuang tampak pada pembelaannya di muka pengadilan terhadap pejuang-pejuang RI yang tertangkap dengan tuduhan menyelundupkan candu untuk dibarter dengan senjata. Peristiwa lainnya adalah pembelaan Soediman bagi anak-anak Tentara Pelajar (TP) di Bali, yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Soediman berjuang membela anak-anak TP agar terbebas dari hukuman. Atas pembelaan Soediman anak-anak TP bebas dari segala tuduhan. Ketika anak-anak TP datang kepada Soediman untuk menyatakan

puas dan terima kasihnya, serta memohon ma'af karena tidak mampu memberikan imbalan atas jasa Soediman sebagai pembela, dengan spontan Soediman menjawab ia tidak memikirkan hal itu. Sebab semua yang ia lakukan adalah kewajibannya sebagai bangsa Indonesia yang harus membela cita-cita luhur bangsanya. Untuk itu ia cukup puas anak-anak TP tersebut telah bebas dari tuduhan Pemerintahan NICA. (A. Soehardi, 1996: 43)

## **Mendidik Kader Hukum**

**SETELAH** beberapa waktu lamanya berdinasi di bidang peradilan, kemudian Soediman pindah ke bidang pendidikan. Hal itu berawal pada tahun 1946, ketika ia mengisi kegiatannya yang sudah padat untuk mengajar di Fakultas Hukum dan Kesusastraan pada Perguruan Tinggi Darurat Republik Indonesia. Aktifitasnya sebagai pengajar disahkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan

Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 25 September 1946 Nomor 966/T.O. Status sebagai pengajar dirangkap pula sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi Darurat Republik Indonesia di Jakarta. (Catatan Mr. Soediman, t.t.)

Selama menjabat sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi Darurat Republik Indonesia, Soediman banyak menemui kendala. Namun menurut Soediman kendala itu adalah bagian dari perjuangan untuk bangsa dan negara. Kendala itu datang dari situasi politik di pemerintahan Republik Indonesia sendiri juga dari tekanan pemerintahan NICA.

Pada 21 Juni 1946, NICA Belanda mendirikan Nood Univeriteit (Universitas Darurat) dengan menghimpun Technicse Hogeschool (THS, Sekolah Tinggi Teknik), Geneeskundige Hogeschool (GHS, Sekolah Tinggi Kedokteran) dan Rechts Hogeschool (RHS, Sekolah Tinggi Hukum). Kemudian berdasarkan Hoger Onderwijs Ordonantie 1946 (Stbl, 1947, No. 47), Nood Univeriteit itu dijadikan Universiteit van Indonesie. (A. Soehardi, 1996: 58-59)

Perguruan tinggi yang didirikan NICA diperuntukan bagi pelajar keturunan Belanda asli yang tinggal di Indonesia, keturunan Indo, keturunan timur asing (Cina, Arab dan lain-lain) dan kalangan pribumi. Para mahasiswanya mendapat fasilitas bebas biaya kuliah, buku-buku gratis, mendapat uang saku serta tempat kuliah yang tetap dan nyaman (kampus Universiteit van Indonesie sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia). Selain itu, mahasiswa Universiteit van Indonesie di asramakan di jalan Pegangsaan Timur 17, Menteng. Kebijakan NICA itu untuk mempengaruhi generasi muda Indonesia agar tetap mendukung pemerintahan kolonial dan membenci perjuangan kemerdekaan yang sedang berkobar saat itu. (Priyatna Abdurrasyid, 2007: 3)

Sebaliknya Perguruan Tinggi Darurat Republik Indonesia (PDTRI) yang dipimpin Soediman tidak memiliki gedung kuliah dan administrasi yang tetap. Selain itu, pihak NICA melakukan tekanan dan teror terhadap para mahasiswa dan dosen PTDRi. Tentara KL, KNIL, PID (intel) dan alat-alat keamanan pemerintahan NICA lainnya

melakukan ancaman, razia, penangkapan, penyiksaan terhadap dosen-dosen dan mahasiswa PTDRl. Tanpa menyerah Soediman tetap melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan gigih, demi mendidik murid-muridnya untuk masa depan Republik Indonesia. Kegigihan dan keberanian Soediman inilah yang memberikan motivasi pada murid-muridnya untuk tetap berkuliah di bawah ancaman senjata NICA. (Priyatna Abdurrasyid, 2007: 2-3)

Untuk menghindari penangkapan perkuliahan dilaksanakan secara berpindah-pindah. Tempat-tempat yang pernah menjadi sarana perkuliahan antara lain:

1. Gedung Societeit (kemudian menjadi kantor Imigrasi), jalan Teuku Umar, Menteng.
2. Gedung Kesenian (sekarang menjadi Gedung Kesenian Jakarta), Pasar Baru.
3. Gedung Miss Tjitjih, Sumur Batu, Kemayoran.
4. Kampus Universitas Kristen Indonesia, depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) di jalan Diponegoro

5. Setelah agresi militer Belanda, perkuliahan sering dilaksanakan di pavilion dan garasi rumah Soediman, Kebon Sirih 36. (Wawancara dengan Achmad Soehardi Kartohadiprodjo, 15 Juni 2007).



Rumah Soediman di jalan Kebon Sirih 36, salah satu tempat perkuliahan Perguruan Tinggi Darurat Republik Indonesia

Walaupun sejak tahun 1946 Soediman sudah mengelola PTDRI, namun baru pada tanggal 10 Maret 1947, secara resmi Soediman pindah kedinasan dari Kehakiman ke Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dengan penetapan Soediman sebagai Pegawai

Tingkat III, diperbantukan pada Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Tugas resmi Soediman di Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan adalah sebagai Sekretaris Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang waktu itu Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia dijabat oleh Mr. Soewandi.

Di tengah persaingan dengan universitas buatan NICA, keberadaan Perguruan Tinggi Darurat Republik Indonesia tetap terjaga. Hanya pada bulan Juli 1947, Soediman sempat berhenti mengajar selama sebulan karena sibuk menjadi pembela di pengadilan untuk para pejuang Republik Indonesia yang ditangkap Belanda. Pada bulan Agustus, September dan Oktober 1947, Soediman bersama kawan-kawannya kembali mengajar walaupun tidak menerima gaji sejak bulan Juli 1947. Pada waktu itu, Soediman sempat menguji pada sidang sarjana para mahasiswa antara lain Sanjoto (Wartawan Pedoman), Murad Astrawinata (Kementerian Keuangan), R.K.A. Djajadiningrat (Kementerian Pertahanan), A.Z. Abidin (Pengacara).

Antara Oktober 1947 hingga Oktober 1948, situasi politik di Jakarta semakin memanas. Hal itu akibat dari agresi militer Belanda Pertama yang dilancarkan pada tahun 1947. Banyak mahasiswa dan dosen dari Perguruan Tinggi Darurat Republik Indonesia yang pergi mengungsi bahkan sebagian ikut mengangkat senjata menghadapi tentara Belanda. Aktivitas mengajar di Fakultas Hukum dan Kesusastran terhenti, karena mahasiswanya tidak ada dan dosennya hanya tinggal Soediman.

Pada bulan Oktober 1948, atas permintaan para pemuda yang baru tamat SMA di Jakarta, Soediman membuka kembali Perguruan Tinggi Hukum dan Kesusastran dengan tenaga pengajar baru . Tenaga pengajar yang baru adalah Mr. Lukman Wiriadinata, Mr. Ismail Thajib, Mr. Surjotjondro dan Dr. Kushardjono. Pimpinan dan staf pengajar di perguruan tinggi itu tidak digaji. Uang kuliah yang ditetapkan menurut aturan-aturan Republik Indonesia, dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional kuliah. Jika ada sisanya, maka baru dibagi diantara para pengajar. Bagian masing-masing tidak

pernah melebihi R. 100,- (seratus rupiah) Di antara para mahasiswanya pada saat itu adalah Usama Masduki, Sri Budojo (Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan) Hasjim Mahdan (Wartawan Indonesia Raya). (Catatan Mr. Soediman, t.t.)

Pada tahun 1949, menjelang pengakuan kedaulatan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia membentuk Panitia Persiapan Negara (PPN). Tugas yang dibebankan adalah mempersiapkan pengambilalihan perguruan tinggi dari Pemerintahan NICA Belanda. Untuk melaksanakan tugas tersebut dibuatlah Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1950. Undang-undang Darurat itu mewajibkan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat yang waktu itu dijabat Dr. Bahder Djohan mengambil tindakan secepat-cepatnya terhadap status Universiteit van Indonesie. (A. Soehardi, 1996: 58)

Setelah pengambil alihan Universiteit van Indonesie, maka oleh Pemerintah Republik Indonesia dibentuklah Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia

Serikat, dengan presidennya adalah Ir. Raden Mas Panji Soerachman Tjokrohadisoerio. Pada tahun 1951, nama perguruan tinggi itu berubah menjadi Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Pada 1952, berubah menjadi Universiteit Indonesia, saat itu pula Universiteit Indonesia menerima penggabungan diri Perguruan Tinggi Darurat Indonesia yang dipimpin Soediman. Pada tahun 1956, perguruan tinggi itu berubah menjadi Universitas Indonesia.



Foto-foto dari kiri ke kanan No. 2 Prof. Mr. Dr. Hazairin; No. 3 Prof. Mr. Satochid Kartanegara; No. 4 Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo; No. 6 Prof. Mr. Dr. Soepomo; No. 8 Prof. Mr. H. Resink; No. 9 Prof. Soedjono D. Poesponegoro

Bersama-sama Mr. Suwandi, Soediman ikut aktif membantu Soerachman Tjokrohadisoerio membina Universitas Indonesia. Selama masa pengabdianya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Soediman pernah diangkat sebagai Sekretaris Fakultas Hukum mendampingi Djokosutono yang menjabat sebagai dekan. Selain di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Soediman juga diangkat sebagai Guru Besar di Akademi Hukum Militer.



Pidato pengukuhan Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo sebagai Guru Besar Universitas Indonesia, tanggal 17 Januari 1953

Pada 1957, Soediman diminta bertugas di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ia bertemu dengan berbagai orang yang berasal dari berbagai macam suku bangsa namun hidup dalam satu hukum Amerika Serikat. Kemudian ia mempelajari filosofi hukum Amerika Serikat. Soediman kemudian tertarik dengan sistem hukum barat. Pada saat itu Soediman berpikir pola barat dengan masuk ke Partai Sosialis Indonesia. (A. Soehardi, 1996: 60)

Sekembalinya dari Universitas California, Barkeley, Soediman sedianya akan kembali bertugas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Namun formasi untuk Soediman sudah ditempati orang lain. Profesor Sarwono yang ketika itu memimpin Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) meminta Soediman untuk bekerja di lembaga itu.

Pada tahun 1961, Soediman mengajukan permohonan pensiun, dengan pertimbangan ia merasa cukup pengabdianya terhadap bangsa dan Negara. Kemudian ia memboyong seluruh keluarganya pindah ke Bandung. Atas anjuran Dekan Fakultas Hukum, Universitas

Parahiyangan Bandung, Profesor Pang Lay Kim, selepas pensiun Soediman mengajar di Universitas Katolik Parahiyangan Bandung. Selain itu Soediman masih tetap mengajar di Akademi Hukum Militer di Jakarta.

Selain mengajar Soediman juga dipercaya sebagai Dekan Fakultas Hukum Parahiyangan. Sejak tinggal di Bandung Soediman juga diminta mengajar di Seskau, Sespuko, Sespukad, serta pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. (A. Soehardi, 1996: 61)

Dalam setiap kesempatan Soediman selalu berusaha memacu semangat generasi muda untuk berjuang demi kemajuan bangsa. Pada tahun 1960an, kepada para mahasiswanya Soediman acap kali menganjurkan untuk menjadi generasi yang berani melawan penyimpangan politik. Menurutnya apabila generasi sebelum kemerdekaan bukan generasi yang pemberani, maka kita sekarang belum merdeka. Soediman merasa gembira anjurannya menjadi pembakar semangat kebangkitan mahasiswa angkatan 66 melawan penyelewengan yang terjadi dalam negara.

Menurut mahasiswanya, Soediman adalah prototipe dari seorang sarjana atau intelektual yang memiliki

keutuhan pribadi (personal integritas) yang selalu terpelihara dalam keadaan apapun juga. Bagi kebanyakan mantan mahasiswanya, Profesor Mr. Soediman Kartohadiprodjo adalah bapak, dan ilmuwan yang menjunjung tinggi ide negara hukum. Menurut mahasiswanya, hal yang paling mengesankan selama berkenalan dengan Soediman adalah kualitas kemanusiaan guru besar itu. Dari wajah Soediman selalu tercermin sifat-sifat kejiwaan seorang bapak yang selalu berusaha mengenal mahasiswanya secara pribadi. Salah satu kesan dari seorang mantan mahasiswanya tercermin dalam tulisan berikut ini:

*"Kami, mahasiswa-mahasiswanya, tahun pertama dibimbing mencari-cari peraturan dan membaca peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan tidak pernah diminta dihafal luar kepala, tetapi kami harus bisa menunjukkan dimana hal itu tertulis..."*

(A. Soehardi, 1996: 71)



Jenazah Prof. Mr. Soediman disemayamkan di kampus Universitas Parahiyangan sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Cikutra Bandung.

Prof. Mr. Soediman masih tetap setia mendidik, mengajar dan membimbing mahasiswa hingga akhir hayatnya. Prof Mr. Soediman tutup usia pada tanggal 26 Januari 1970 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung.

## **Bab 6**

# **Pemikiran Mr. Soediman Kartohadiprodjo**

### **Persatuan Nasional**

**PEMIKIRAN** tentang persatuan nasional sudah terpatri dalam hati Soediman sejak tahun 1927, ketika ia masuk ke perguruan tinggi. Hal itu mendorong dirinya aktif dalam organisasi Perhimpoeanan Peladjar-Peladjar Indonesia

(PPPI) yang memperjuangkan terjadi persatuan dalam sebuah kesatuan pada organisasi-organisasi pemuda pelajar kedaerahan pada saat itu.

Pemikiran Mr. Soediman tentang persatuan nasional tidak hanya diperjuangkan pada masa pergerakan, namun terus berlanjut di masa setelah Indonesia merdeka. Menurut Soediman konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah lebih baik dari konsep negara federal. Karena konsep NKRI lebih ideal untuk mewujudkan kesejahteraan dalam satu kesatuan bangsa.

Konsep pemikiran Mr. Soediman tentang persatuan nasional, mengilhami pemikiran anak didiknya, antara lain konsep hukum laut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja. Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja wilayah Indonesia meliputi kepulauan dan lautan yang menjadi satu kesatuan.

## **Negara Hukum**

**SEBAGAI** seorang ahli hukum, Mr. Soediman pernah

bekerja di semua bidang dalam ilmu hukum. Ia pernah menjadi hakim, jaksa, pengacara dan terakhir pengajar atau pendidik dalam ilmu hukum. Dari semua profesi yang pernah dijalannya tersebut menunjukkan bahwa Mr. Soediman bukan sekedar berwacana dalam teori saja tetapi sudah mempraktekan ilmu hukumnya di masyarakat.

Menurut Soediman untuk memahami hukum kita harus memahami apa itu filsafat hukum. Filsafat hukum adalah pendirian atau penghayatan yang paling fundamental yang dianut orang, masyarakat atau negara yang menjadi landasan berlakunya hukum. Landasan hukum berupa tata hukum serta keseluruhan proses-proses kehidupan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sebagai seorang tokoh yang turut memperjuangkan eksistensi Indonesia di masa perang kemerdekaan tahun 1945-1949, Mr. Soediman mencita-citakan masyarakat Indonesia yang sadar hukum. Ia mengidealkan suatu negara hukum bagi Negara Indonesia yang merdeka. Pemikirannya tentang negara hukum tertuang dalam kertas kerjanya ketika diangkat menjadi Guru Besar Fakultas Hukum

Universitas Indonesia pada tahun 1952-1958. Dalam kertas kerjanya yang berjudul “Negara Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum”, terkurip kalimat antara lain:

*“Hukum sangat besar artinya bagi kehidupan bernegara. Hukum, manusia dan negara mempunyai pertalian erat, yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Baik hukum maupun negara, kedua-duanya menyangkut kehidupan manusia. Tidak ada hukum dan kalau tidak ada manusia.”*

Dalam usaha mewujudkan cita-citanya tentang negara hukum, Soediman berusaha menyebarluaskan konsep pemikirannya kepada semua orang termasuk kepada keluarga dan murid-muridnya. Menurut para mahasiswanya, salah satu metode pendidikan Mr. Soediman yang menarik dan dianggap tepat dan mudah dipahami serta dipraktikkan adalah pengenalan nilai-nilai hukum dalam kehidupan umum bermasyarakat. Metode pendidikannya dilakukan dengan cara dialog. Contohnya sang mahasiswa ditanya dimana rumahnya? untuk menuju kampus naik apa? selama perjalanan dari rumah ke kampus melihat fenomena hukum apa di masyarakat (peraturan lalu lintas, kecelakaan lalu

lintas dan lain-lain)? Bagaimana menyikapinya? Dari metode itu mahasiswa dibiasakan untuk menjunjung hukum dalam kehidupan sehari-harinya.

Mr. Soediman mengajak semua orang untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal itu tercermin dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar pada Universitas Indonesia:

*“Saudara-saudara, marilah kita bekerja bersama dengan penuh tenaga yang ada pada kita, dan berusaha menebus hutang kita kepada kawan-kawan kita yang gugur dalam memperjuangkan cita-cita mencapai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dan saya kira suatu Negara hukum. Saudara-saudara, tanah air memanggil dan menunggu.”*

## **Filsafat Pancasila**

**AWAL** pergulatan pemikiran Mr Soediman mengenai filsafat Pancasila terjadi pada tahun 1961. Sebelumnya Mr. Soediman tertarik pada konsep hukum barat. Hal itu dapat

dimaklumi sebagai orang yang pernah mendapat pendidikan semasa Hindia Belanda dan pernah melakukan penelitian hukum di Amerika Serikat.

Ketika sedang melakukan penelitian hukum di Amerika Serikat, Soediman selalu ingat pernyataan dari Presiden Soekarno tentang “Think and Rethink” yang disampaikannya ketika memberi amanat kepada para mahasiswa dan dosen yang akan melanjutkan studi ke luar negeri. Maksud Presiden Soekarno dalam amanatnya adalah agar para mahasiswa dan dosen tidak mengadopsi begitu saja ilmu dari barat, tapi harus dikaji ulang sesuai dengan pemikiran Indonesia, sehingga ilmu yang diraih dapat diaplikasikan di tanah air. (Wawancara dengan Bambang Oetoyo Kartohadiprodjo, tanggal 1 Oktober 2007).

Pada awalnya, Soediman berusaha mempertemukan konsep pemikiran Pancasila dengan pemikiran hukum barat. Namun ternyata kedua konsep tersebut tidak dapat dipertemukan. Karena dalam pemikiran Barat, individu dan kebendaan adalah hal utama, Sedangkan dalam Pancasila ada kedwitunggalan antara individu dengan persatuan.

Setelah Mr. Soediman menekuni tulisan-tulisan Bung Karno tentang Pancasila, hatinya semakin tertarik dan menyimpulkan konsep Pancasila yang paling tepat sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pemikiran tentang Filsafat Pancasila tertuang dalam tulisannya yang berjudul “Membina Tata Kehidupan Politik Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945”, yang berbunyi:

*“Filsafat Pancasila ini, kalau diterapkan pada manusia, maka ternyata bahwa Pancasila ini melihat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, ialah dengan demikian bahwa manusia diciptakan sebagai salah satu kesatuan, satu umat manusia. Tetapi meskipun demikian, diantaranya kesatuan (umat) manusia ini yang hidup tersebar di seluruh dunia, yang bagian yang satu tidak selalu sama keadaan iklim, tanah, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, sehingga keadaan ini menimbulkan perbedaan-perbedaan antara kelompok manusia dari bagian yang satu dari dunia dari bagian lainnya. Keadaan ini menimbulkan adanya bangsa-bangsa di dalam kesatuan (umat) manusia.*

*Tetapi meskipun demikian : “internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar pada nasionalisme,*

*nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme”.*

*Ini diterapkan pada sesuatu kelompok – satu kesatuan individu-individu pergaulan hidup manusia yang merupakan satu kesatuan dimana masing-masing individu mempunyai kepribadiannya, berarti bahwa kehidupan itu adalah hidup “kekeluargaan”.*

*“Kekeluargaan”, karena tanpa mengabaikan kepribadian masing-masing orang sadar merupakan anggota dari satu kesatuan; tanpa adanya anggota-anggota lainnya dari kesatuan ia tidak dapat hidup secara bahagia, secara layak; suatu keadaan seperti kita jumpai dalam keluarga dengan anggota-anggotanya. Suatu pendirian hidup di antara bangsa Indonesia yang telah dilihat oleh Prof. Mr. C. van Vollenhoven dan yang ia sebut dengan adanya “commune trek” (gaya-kesatuan) pada bangsa Indonesia.*

*Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang menjiwai manusia dengan Filsafat Pancasila itu adalah jiwa kekeluargaan.*

*Selanjutnya, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia itu untuk hidup bahagia (dengan keadilan sosial, sila 5), tetapi hidup bahagia ini tidaklah dapat diperoleh dengan desak*

*mendesak, guling menggulingkan, apalagi dengan bunuh-membunuh, melainkan dengan musyawarah/mufakat.”*

Dalam Pidato yang diucapkan ketika merayakan hari ulang tahun Perguruan Tinggi Katholik “Parahiyangan” pada hari Rabu 17 Januari 1962, Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo memaparkan hal mengenai “Penglihatan Manusia Tentang Tempat Individu dalam Pergaulan Hidup (Suatu Masalah)”. Dalam pidatonya tersebut Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo menyebutkan: “Kita harus kembali ke “kepribadian Indonesia”.

Menurut Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo untuk menuju ke kepribadian Indonesia, kita perlu menelaah budaya masa lampau. Budaya masa lampau kita yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah hukum adat. Berhubungan dengan alam pikiran yang menjadi latar belakang dari hukum adat, ternyata jauh dari pikiran dengan yang dinamakan “demokrasi Barat” dengan sosialismenya. Hal yang lebih sempurna dari prinsip politik yang berlandaskan hukum adat adalah cita-cita “Negara Pancasila” dan “Masyarakat Pancasila”.

## Daftar Sumber

### Manuskrip

Abdurrasyid, Priyatna. "Prof. Soediman Kartohadiprodjo Guruku". Makalah pada *Seminar Pemikiran Kebangsaan Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo* di Museum Sumpah Pemuda, 23 Mei 2007.

Djundjunan, Soelasbawiati. (tidak terbit). *Mengenang Orang Tua Kami : Bapak Bawadiman Kartohadiprodjo dan Ibu Oemi Kartohadiprodjo*.

Kartohadiprodjo, Soediman. 1953. "Negara Republik Indonesia Negara Hukum". *Pidato Orasi Penerimaan Gelar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia* pada 17 Januari 1953..

---

\_\_\_\_\_. 1962. "Penglihatan Manusia Tentang Tempat Individu dalam Pergaulan Hidup (suatu masalah)". *Pidato yang Diucapkan Untuk Merayakan Hari Ulang Tahun Perguruan Tinggi Katholik Parahyangan. Rabu, 17 Januari 1962. Jakarta: PT. Pembangunan.*

---

\_\_\_\_\_. 1969. *Membina Tata Kehidupan Politik Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.*

---

\_\_\_\_\_. (tidak terbit). *Catatan Riwayat Hidup Mr. Soediman Kartohadiprodo.*

## Buku

Abdulgani, Ruslan. 1980. "Latar Belakang dan Dimensi Sejarah Hari Sumpah Pemuda", Artikel pada *Surabaya Post.*

Abdul Rahman, Momon, et. al. 2003a. *Jong Java Peranannya dalam Persatuan Bangsa.* Jakarta: Museum Sumpah Pemuda.

---

\_\_\_\_\_. 2003b. *Indonesia Muda, Catatan Penting Persatuan Organisasi Pemuda.* Jakarta: Museum Sumpah Pemuda.

---

\_\_\_\_\_ . 2005. *Sumpah Pemuda Latar Sejarah dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Nasional*. Jakarta: Museum Sumpah Pemuda.

---

\_\_\_\_\_ . 2006a. *Jong Islamieten Bond, Pergerakan Pemuda Islam 1925-1942*. Jakarta: Museum Sumpah Pemuda.

---

\_\_\_\_\_ . 2006b. *Pergerakan Mahasiswa Pada Masa Hindia Belanda, Perhimpunan Peladjar-Peladjar Indonesia 1926-1942*. Jakarta: Museum Sumpah Pemuda.

Biro Pemuda P dan K. 1965. *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia* . Jakarta: PN Balai Pustaka.

Djumhur. 1976. *Sejarah Pendidikan*. Bandung. CV. Ilmu.

Hanafiah, M. A. et al. 1976. *125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia 1851-1976*. Jakarta : Panitia Peringatan 125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia.

Kartohadiprodjo, Achmad S. 1996. *Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo*. Penerbitan Khusus Dalam Rangka Mengabadikan Nama Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Mestoko, Soemarsono. Et al 1985. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Miert, Hans Van. Terj. Sudewo Satiman. 2003. *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930*. Jakarta: KITLV Jakarta, Hasta Mitra dan Pustakan Utan Kayu.
- Murniatmo, Gatut. 1983. *Prof. Dr. Soediman Kartohadiprodjo, SH*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Poerbopranoto, Koentjoro, et.al. 1930. *Gedenkboek Jong-Java (Kitab Peringatan Jong Java) 7 Maart 1915-20 April 1930*. Jakatera: Pedomam Besar Jong Java.
- 
- \_\_\_\_\_ . 1978. "Sumpah Pemuda Sebagai Peristiwa Nasional" dalam Bunga Rampai Sumpah Pemuda. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rufaedah, Dedah, et.al. 2006. *Pengembangan Museum Nasional*. Jakarta: Museum Nasional.
- Sakri, Adjat. 1979. *Dari TH ke ITB, Kenang-kenangan Lustrum 4*. Bandung: ITB Press.

Supomo. *Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: NV Djakarta-Noordhoff Kolf.

## Artikel

Padmadinata, Hidayat. 1980. “Diperlukan Persepsi dan Orientasi Baru”, Artikel pada *Kompas*.

Rajagukguk, Erman. 1980. “Hukum Adat Juga Menjadi Dasar Persatuan Indonesia”, Artikel pada *Sinar Harapan*.

Sidharta, Arief. 1970. “In Memoriam Professor Soediman”. Artikel pada *Mahasiswa Indonesia*, Edisi Jawa Barat. Bandung.

Simatupang, Ihromi. 1980. “In Memoriam Professor Soediman Kartohadiprodjo SH”. Artikel pada *Sinar Harapan*.

## Narasumber

Wawancara dengan Achmad Soehardi Kartohadiprodjo, bertempat di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, tanggal 15 Juni 2007.

Wawancara dengan Mohammad Harijono Kartohadiprodjo,  
bertempat di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan,  
tanggal 15 Juni 2007.

Wawancara dengan Bambang Oetoyo Kartohadiprodjo,  
bertempat di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan,  
tanggal 15 Juni 2007.

# Lampiran 1

## Piagam Pendirian Indonesia Muda

### Piagam

#### Mendirikan Perkumpulan Indonesia Muda

Pada Tanggal 31 Desember 1930 Masuk 1 Januari 1931

Pukul 12 Malam

Di Kota Surakarta

Kami anggota Komisi Besar Indonesia Muda, semuanya berkedudukan di kota Jakarta, memandang sebagai suatu kehormatan yang tertinggi karena mendapat kesempatan yang mulia membubuhkan tanda tangan kami pada kesudahan Surat Piagam ini, seperti perlambang penutupi perjalanan kami Komisi Besar melakukan pekerjaan dan kewajiban hendak mempersatukan putera dan puteri Indonesia yang berbangsa satu, bertumpah darah satu, dan bersemangat satu, seperti telah diperintahkan oleh keputusan Kerapatan Besar :

Pertama.

Perkumpulan Jong Java, pada awalnya bernama Tri Koro Dharmo, di kota Semarang pada tanggal 27 Desember 1929.

Kedua.

Perhimpunan Pemuda Indonesia di kota Mataram pada tanggal 31 Desember 1929.

Ketiga.

Perkumpulan Jong Celebes di kota Jakarta pada tanggal 15 Maret 1930.

Keempat.

Perkumpulan Pemuda Sumatera, pada awalnya bernama Jong Sumatranen Bond, di kota Jakarta pada tanggal 23 Maret 1930.

Dan pada saat ini, pada petang Rebo malam Kamis tanggal 31 Desember 1930 masuk 1 Januari 1931, sampailah kami pada waktu yang paling akhir melakukan kewajiban seperti yang terserah kepada kami Komisi Besar, dan terbukalah zaman baharu, tempat dasar yang tiga dan tujuan yang satu menyala dalam hati sanubari segala putera dan puteri, baik yang bernaung di bawah panji-panji perkumpulan Indonesia Muda, atau yang percaya kepada dasar dan tujuannya, sehingga ternyatalah dengan seterang-terangnya keperluan dan hak Indonesia Muda akan berdiri.

Dan kami bubuhkan tanda tangan kami di hadapan bangsa Indonesia dan di tengah-tengah kerapatan besar di kota Surakarta, yang dilangsungkan sejak tanggal 28 Desember 1930 sampai ke tanggal 3 Januari 1931.

Yang diatur dan dipimpin menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga perkumpulan Indonesia Muda, seperti yang

disahkan oleh persidangan Komisi Besar di kota Jakarta pada hari Ahad tanggal 27 Oktober 1929.

Yaitu setelah memperhatikan segala yang termaktub dalam surat siaran kami Komisi Besar dengan namanya **Aturan Mendirikan Perkumpulan Indonesia Muda**.

Dan setelah mendengarkan pembicaraan dan menimbang segala putusan yang akan diambil dalam kerapatan besar perkumpulan yang keempat.

Dan yakin kepada dasar yang tiga dan tujuan yang satu, serta percaya kepada semangat yang berdebar-debar dalam dada kerapatan besar ini.

Lalu kerapatan mengambil putusan atas 25 cabang Indonesia Muda di seluruh tanah Indonesia, yang membawa hak suara dan mengutus 393 anggota mendirikan perkumpulan Indonesia Muda dengan segala upacara, yang memakai susunan dan tujuan seperti yang tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga Perkumpulan Indonesia Muda.

Seterusnya pimpinan perkumpulan Indonesia Muda kami serahkan kepada Pedoman Besar Indonesia Muda, dengan mengeluarkan pengharapan dan keyakinan, bahwa pekerjaan kami inni akan diteruskan dengan segala tenaga dan kekuatan, supaya segala pemuda, putera dan puteri, dapat mempersembahkan baktinya ke dalam perdupaan tanah air dan bangsa, supaya sampai ke Indonesia Raya.

Kami Komisi Besar Indonesia Muda :

R. Koentjoro Poerbopranoto

Muhamad Yamin

R. Joesopadi Danoehadiningrat

R. Sjahrial

Asaat Datuk Muda

R. Soewadji Prawirohardjo

Adnan Kapau Gani

Mohammad Tamzil  
R. Soerjadi  
G. R. Pantouw

Surakarta, 31 Desember 1930 - 1 Januari 1931

Catatan :

Nama-nama tokoh ditulis lengkap, tidak disingkat seperti pada naskah asli, *Kerapatan Besar Indonesia Muda, Jangka I, 29 Desember 1930 – 2 Januari 1931*, hal 38; Soeharto, 1981 : 321 – 323.

## Lampiran 2

### Anggaran Dasar Indonesia Muda

#### ANGGARAN DASAR Perkumpulan Indonesia Muda

Seperti disahkan oleh persidangan Komisi Besar Jakarta, pada hari Ahad tanggal 27 Oktober 1929 dan oleh Kerapatan Besar Indonesia Muda di Solo, pada hari *Minggu* tanggal 1 Januari 1931.

#### Nama, Lama, dan Kedudukan Fatsal 1

- (1) Perkumpulan bernama Indonesia Muda dan kedudukannya di tempat Pedoman Besar
- (2) Lamanya dua puluh sembilan tahun dan dimulai pada tanggal 1 Januari 1931.

## Tujuan dan Usaha Fatsal 2

- (1) Tujuan Perkumpulan ialah memperkuat perasaan persatuan diantara pemuda-pemuda Indonesia yang masih belajar, serta membangkitkan keinsafan dan memperingatkan mereka berbangsa satu dan bertumpah darah yang satu supaya sampai ke Indonesia Raya.
- (2) Selain dari pada mengaku dan memajukan kebudayaan tiap-tiap bagian penduduk Indonesia baik yang rohani maupun jasmani, perkumpulan akan mengikhtiarkan supaya mempunyai kebudayaan Indonesia yang satu, dan memakai bahasa persatuan di dalam pergaulan, yaitu bahasa Indonesia.

## Fatsal 3

Dan lagi Perkumpulan akan menyampaikan tujuan dengan :

- (1) Membangkitkan keinsafan dan memperkuat perasaan harga menghargai dan perasaan persatuan diantara segala anak Indonesia.
- (2) Mengeluarkan majalah dan menerbitkan surat siaran yang lain.
- (3) Mengadakan persidangan dan kursus.
- (4) Mengusahakan sport dan lain-lainnya.
- (5) Menimbulkan perhatian untuk tanah dan bangsa Indonesia pada orang asing.
- (6) Segala usaha lain yang tiada dilarang oleh undang-undang.

## Fatsal 3

Perkumpulan memakai segala usaha yang tidak dilarang Undang-undang.<sup>51</sup>

Politik  
Fatsal 4

- (1) Perkumpulan tidak menjalankan politik
- (2) Anggota dilarang menjalankan politik.

Fatsal 5

Yang boleh jadi anggota yaitu anak Indonesia :

- (1) Yang belajar di sekolah tinggi, pertengahan, Mulo dan vak, juga masuk terhitung sekolah Normal bumiputera dan sekolah lain yang sama tingginya.
- (2) Yang belajar di sekolah yang telah disahkan oleh Pedoman Besar.

Fatsal 6

Perkumpulan boleh mengangkat :

- (1) Bekas anggota dalam Fatsal 5 dan segala orang yang dipikirkan oleh Pedoman Besar jadi anggota luar biasa.
- (2) Yang menolong perkumpulan sekurang-kurangnya serupiah sebulan atau seratus rupiah dengan sekali jadi penderma.
- (3) Murid-murid sekolah rendah yang duduk di dua pangkat yang tertinggi jadi bakal anggota.
- (4) Anggota dan anggota luar biasa yang berjasa bagi perkumpulan atau bagi tujuannya jadi anggota kemuliaan menurut putusan kerapatan besar.
- (5) Pejuang panjadi menurut putusan kerapatan besar.

## Hak Suara Fatsal 7

- (1) Anggota mempunyai suara.
- (2) Bakal anggota tidak mempunyai hak suara.
- (3) Anggota luar biasa mempunyai hak memilih pada pemilihan pedoman cabang dan pada pemilihan utusan kerapatan besar dalam cabang tempat dia masukan jadi anggota; tetapi hanya boleh dijadikan utusan kerapatan besar dengan izin Pedoman Besar serta putusan ini baru diberikan jikalau sangat perlu.
- (4) Anggota kemuliaan dan penderma mempunyai suara memberi nasehat.

## Berhenti Jadi Anggota Fatsal 8

Berhenti jadi anggota, karena :

- (1) Meninggal dunia.
- (2) Minta berhenti.
- (3) Berhenti atau tamat belajar.
- (4) Dikeluarkan.

## Kerapatan Besar Fatsal 9

- (1) Kerapatan besar yang seboleh-bolehnya diadakan sekali setahun, mempunyai kekuasaan setinggi-tingginya dalam perkumpulan.
- (2) Selain dari pada kerapatan besar ayat 1, jikalau dapat diadakan kerapatan antara cabang-cabang yang berdekatan untuk mempercakapkan hal ihwal cabang-cabang itu.
- (3) Pedoman Besar berhak mengadakan kerapatan besar luar biasa asal sesudahnya bermufakat dengan cabang-cabang.

## Cabang dan Ranting

### Fatsal 10

- (1) Pada tiap-tiap negeri, tempat tinggal sekurang-kurang 15 orang anggota, dapat didirikan suatu cabang.
- (2) Dimana jumlah anggota tidak cukup 15 orang dapat diadakan satu ranting.
- (3) Tiap cabang mempunyai satu suara didalam kerapatan besar untuk 15 anggota atau bahagian dari itu diatas 10 orang.
- (4) Tiap-tiap cabang dan ranting mempunyai aturan sendiri, yang tiada boleh berlawanan dengan anggaran dasar dan anggaran tetangga atau putusan kerapatan besar dengan aturan yang ditetapkan oleh Pedoman Besar.
- (5) Cabang dan ranting berdiri dibawah Pedoman Besar.

## Pedoman Besar

### Fatsal 11

- (1) Banyak anggota Pedoman Besar sekurang-kurangnya 7 orang, yaitu ketua, wakil ketua, 2 penulis, 3 bendahara, dan pembantu.
- (2) Ketua dipilih oleh kerapatan besar.
- (3) Segala anggota Pedoman Besar yang lain ditunjukkan oleh rapat umum yang dilangsungkan cabang tempat ketua jadi anggota.

### Fatsal 12

Pedoman Besar wajib memberi tanggungan segala pekerjaan dan perbuatannya pada kerapatan besar.

Larangan  
Fatsal 13

Anggota pedoman Indonesia Muda tiada boleh menjadi anggota pedoman perkumpulan lain.

Kehasilan  
Fatsal 14

Kehasilan perkumpulan dipungut dari :

- (1) Iuran anggota.
- (2) Uang pertolongan dan pemberian.
- (3) Pendapatan yang lain-lain.

Perubahan dan Tambahan Anggaran Dasar  
Fatsal 15

- (1) Perubahan dan tambahan di dalam Anggaran Dasar dilakukan dengan memakai suara sekurang-kurangnya dua pertiga. Perkumpulan diperhatikan pada waktu yang ditentukan dengan memakai suara sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam kerapatan besar yang sengaja diadakan untuk hal itu dalam kerapatan ini mesti berhadir sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara dalam perkumpulan.
- (2) Jikalau dalam kerapatan besar tiada cukup banyaknya suara yang dipastikan dalam ayat (1), maka kuasa kerapatan besar yang diadakan enam bulan sesudah itu sama dengan kuasa kerapatan besar seperti yang tersebut dalam ayat (1).
- (3) Jikalau perkumpulan diperhatikan kerapatan besar menentukan untuk apa gunanya harga benda perkumpulan dengan membuktikan Fatsal 1665 B.W.

Menambah Lama Perkumpulan  
Fatsal 16

Menambah lama perkumpulan lebih dari pada yang ditentukan, diputuskan oleh kerapatan besar dengan suara terbanyak.

Anggaran Tetangga  
Fatsal 17

Aturan perkumpulan yang lebih lanjut diuraikan dalam Anggaran Tetangga dengan memperhatikan Anggaran Dasar

Penutup  
Fatsal 18

Segala perkara yang tiada dapat dilindungi Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga diputuskan oleh Putusan Besar.

Sumber : *Gedenkboek Jong Java, 7 Maart 1915 – 7 Maart 1930*, Jakarta 20 April 1930.

## Lampiran 3

### **Piagam Pembubaran Jong Java**

Putusan

Membubarkan Perkumpulan Jong Java

Kongres Pembubaran perkumpulan Jong Java yang diadakan di kota Semarang pada tanggal 23 – 29 Desember 1929, telah mengambil putusan seperti di bawah ini :

Kerapatan Besar Perkumpulan Jong Java, dahulu bernama Tri Koro Dharmo, yang paling akhir,

Membuka rapat pada tanggal 27 Desember 1929 di kota Semarang,

Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam rapat tadi,

Sesudahnya membicarakan Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga Perkumpulan Indonesia Muda,

Sesudahnya menimbang isi segala pidato dan Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga ini, Kerapatan lalu mengambil putusan dengan memperhatikan *statuten* Perkumpulan Jong Java, dahulu bernama Tri Koro Dharmo Fatsal 19,

Pertama.

Sejak dari saat ini perkumpulan Jong Java, dahulu bernama Tri Koro Dharmo, tidak berdiri lagi.

Kedua.

Sejak dari saat ini segala cabang perkumpulan Jong Java, dahulu bernama Tri Koro Dharmo, diserahkan kepada Komisi Besar Perkumpulan Indonesia Muda.

Ketiga.

Sejak dari saat ini segala cabang perkumpulan Jong Java, dahulu bernama Tri Koro Dharmo, berdiri di bawah pandangan Komisi Besar, dan wajib bersatu di bawah Perkumpulan ini.

Dan mengeluarkan pengharapan, supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat-surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan lain.

Wasalam,

Pedoman Besar  
Perkumpulan Jong Java

Sumber : *Gedenkboek Jong Java, 7 Maart 1915 – 7 Maart 1930*, hal.

## Lampiran 4

### Kegiatan Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo

#### I. Pergerakan Kemerdekaan

1. Ketua perkumpulan murid-murid Indonesia HBS Semarang "Among Pamitran" tahun 1924-1925.
2. Anggota pengurus cabang Jong Java Semarang tahun 1926-1927.
3. Anggota pengurus cabang Jong Java di Jakarta tahun 1927-1928.
4. Anggota pengurus Perhimpoean Peladjar-Peladjar Indonesia (PPPI) di Jakarta 1927-1928.

5. Anggota Kepanduan Indonesia INPO di Jakarta tahun 1927-1928.
6. Ikut Sumpah Pemuda 27-28 Oktober 1928.
7. Sekretaris II Pengurus Besar Jong Java tahun 1929.
8. Anggota / Sekretaris II Komisi Besar “Indonesia Muda” tahun 1929.
9. Anggota pengurus cabang “Indonesia Muda” di Jakarta tahun 1930-1931.
10. Ketua utusan cabang Jakarta ke Kongres “Indonesia Muda” di Yogyakarta tahun 1931.
11. Ketua Studenten Islam Studie Club (SIS) tahun 1935-1936.
12. Duduk dalam beberapa panitia untuk menghadapi Belanda dalam perundingan-perundingan selama perang kemerdekaan, 1945-1949, diantaranya panitia tahanan perang.
13. Membela sebagai pengacara para kawan seperjuangan yang diajukan oleh pemerintah NICA Belanda di depan pengadilan krimonil (1947-1949).

## II. Kegiatan Sosial

1. Anggota pengurus Gedung Pertemuan (Societeit) Indonesia di Tanjungkarang, Lampung tahun 1936-1937.
2. Anggota Panitia Persiapan Setempat Transmigrasi Kaum Intelektuil Indonesia di Tanjungkarang tahun 1937.
3. Anggota Studie Club Semarang tahun 1938-1939.
4. Ketua Centrale Crediet Cooperatie Garut tahun 1939-1943.
5. Anggota Pengurus R.S. Bersalin Budi Kemuliaan di Jakarta tahun 1948-1958.
6. Anggota Pengurus Besar Palang Merah Indonesia tahun 1950-1961.
7. Anggota pengurus Yayasan Perguruan Cikini di Jakarta tahun 1950-1961.

8. Anggota pengurus Yayasan Perguruan Budi Asih di Jakarta tahun 1959-1961.

### **III. Kegiatan Politik**

1. Anggota biasa Partai Sosialis Indonesia (PSI) tahun 1950-1959.
2. Anggota Konstituante sebagai wakil PSI tahun 1956-1957.

### **IV. Kegiatan Ilmu Pengetahuan**

1. Anggota Ned. Ind. Juristen Vereeniging tahun 1936-1942.
2. Anggota Pengurus Perkumpulan Ahli Hukum Indonesia PAHI tahun 1946-1959.
3. Anggota Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) tahun 1956-1959.
4. Wakil Ketua Perkumpulan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI), Pengurus Besar tahun 1959-1961.
5. Sekretaris Panitia Persiapan MIPI tahun 1953-1956.

6. Sekretaris Pengurus MIPI tahun 1956-1957.
7. Sekretaris Umum (Executive Director) MIPI tahun 1958-1961.
8. Tamu sarjana pada Universitas Berkeley Amerika Serikat tahun 1957-1958.
9. Mengunjungi dan bertukar pikiran ilmiah dengan sarjana-sarjana di University of Chicago, Columbia University, John Hopkins University Extension, Washington D.C., Cornell University, New York, Yale University, Harvard University, semuanya di Amerika Serikat. University de Paris, Sorbonne, Paris, Perancis; dan Universitas van Leiden, Nederland, semua di tahun 1958.

## Lampiran 5

### TANDA PENGHARGAAN

1. Bintang Kartika Eka Paksi III; berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 05/TK/Th. 1969.
2. Surat Tanda Penghargaan Menteri Utama Bidang Pertahanan Keamanan, 5 April 1968.
3. Piagam Penghargaan Rektor Universitas Padjadjaran, 24 September 1970.
4. Piagam Anugerah Pendidikan, Pengabdian dan Ilmu Pengetahuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Surat Ucapan Selamat dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta tertanggal Jakarta, 27 Agustus 1970, berkenaan penganugerahan dari Menteri P dan K.

SOEDIMAN KARTOHADIPRODJO adalah salah seorang dari sembilan tokoh pemuda yang terpilih untuk memformulasikan persatuan pemuda ke dalam sebuah organisasi pemuda. Kesembilan tokoh itu terpilih dalam sebuah pertemuan pada 29 April 1929 di gedung Indonesische Cubgebouw, jalan Kramat 106, Jakarta (sekarang Museum Sumpah Pemuda). Tugas yang dibebankan kepada mereka sungguh luar biasa berat, membawa pergerakan pemuda melewati masa transisi dan pergerakan pemuda kedaerahan menjadi pergerakan pemuda nasional. Berhasil tidaknya pergerakan nasional melewati masa transisi tergantung kepada kemampuan mereka mengakomodasi kepentingan semua pergerakan pemuda. Berkat kerja keras mereka selama satu tahun, pada tanggal 1 Januari 1931 dapatlah dibentuk sebuah wadah pergerakan pemuda bernama Indonesia Muda. Dengan terbentuknya Indonesia Muda tidak ada lagi organisasi pemuda kedaerahan.

Diterbitkan oleh  
Museum Sumpah Pemuda  
Jl. Kramat Raya No. 106 Jakarta 10420  
Telp. 3103217, 3154546; Fax. 3154546 ext 18  
e-mail : musda@cbn.net.id  
<http://www.museumsumpahpemuda.go.id>

Perpustakaan  
Jender